



LAPORAN KINERJA

T A H U N 2 0 2 2

KALIMANTAN
S E L A T A N

T A H U N 2 0 2 2

KATA PENGANTAR



Pembangunan berbagai macam infrastruktur pada tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Selatan tidak terlepas dari kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan dibantu oleh dua Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dibawah oleh Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Pemangku kepentingan terkait juga turut berperan dalam mendukung pencapaian kinerja Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan dalam berkinerja pada tahun 2022 dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai wujud pertanggung jawaban terhadap penggunaan seluruh sumber daya dengan menerapkan strategi pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas PUPR. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2022, Dinas PUPR mencapai kinerja yang sangat memuaskan dengan capaian 103,09%.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas PUPR ini telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini telah melalui proses diskusi, baik di lingkungan internal Dinas PUPR maupun dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Tim Evaluator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka sinkronisasi pelaporan dan penilaian.

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dijabarkan tentang gambaran keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun periode anggaran. Berbagai pencapaian kinerja tahun 2021 merupakan upaya sungguh-sungguh seluruh jajaran Dinas PUPR yang telah berkontribusi untuk instansi ini.



Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Dinas PUPR dan menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Provinsi Kalimantan Selatan

Ir. AHMAD SOLHAN, ST, MT

Pembina Tingkat I

NIP. 19720119 199703 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ketersediaan infrastruktur telah diyakini akan memegang peranan penting dalam perkembangan dan kemajuan suatu bangsa. Dengan hadirnya infrastruktur yang handal maka terwujudnya pemenuhan Hak Dasar Rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, kesehatan dan hak-hak lainnya akan terdukung lebih optimal.

Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur selain perlu terus ditingkatkan, juga harus benar-benar dirancang dan diimplementasikan secara sistematis dengan matang sesuai kondisi dan potensi ekonomi dan sosial serta tingkat kebutuhan dan perkembangan suatu wilayah. Tentunya termasuk dalam hal ini adalah pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang harus selaras dan bersinergi dengan sektor-sektor lainnya disamping adanya kebersamaan langkah antara Pemerintah dengan pemerintah daerah di dalam pelaksanaannya

Kondisi seperti digambarkan tersebut di atas, selaras pula dengan amanat Undang-Undang sektor ke PUPR-an yang meliputi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Sejalan dengan itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021 tahapan ketiga dari pelaksanaan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025, Menetapkan visi yaitu “KALSEL MAPAN (MANDIRI DAN TERDEPAN) LEBIH SEJAHTERA BERKEADILAN, BERDIKARI DAN BERDAYA SAING”.

Terkait dengan peran infrastruktur PUPR di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan telah memiliki 1 (satu) tujuan dalam pembangunannya yang akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Kepala Daerah . Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah

“Meningkatkan pembangunan yang terpadu melalui penyediaan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi & pengembangan wilayah”



Sasaran untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

Meningkatnya ketersediaan air untuk mendukung kedaulatan pangan

Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing

Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar

Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor di tingkat Provinsi Kalsel

Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi Provinsi Kalsel

Meningkatnya kualitas tata kelola Dinas PUPR Provinsi Kalsel



DAFTAR ISI

Hal.

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	vi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. LATAR BELAKANG	1
	B. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DAN TUGAS POKOK	2
	C. STRUKTUR ORGANISASI	5
	D. ISU STRATEGIS SKPD	10
	E. SISTEMATIKA PENYAJIAN	12
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	14
	A. RENCANA STRATEGIS	14
	B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	17
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	26
	A. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI	27
	1. Sasaran RPJMD.....	27
	2. Sasaran Kepala Dinas.....	30
	3. Bidang Sumber Daya Air.....	40
	4. Bidang Bina Marga.....	53
	5. Bidang Cipta Karya.....	61
	6. Bidang Bina Konstruksi.....	73
	7. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan.....	85
	8. Bidang Sekretariat.....	103
	B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	
	1. Anggaran dan Realisasi APBD 2022.....	108
	2. Anggaran dan Realisasi menurut sasaran dan program.....	108



	3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	109
BAB IV	PENUTUP	113
LAMPIRAN		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi dari sistem perencanaan, pemrograman, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan diperlukan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian dituangkan didalam laporan kinerja instansi pemerintah.

Laporan kinerja disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0106 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2017 serta Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0366/KUM/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diampu oleh setiap instansi pemerintah atas penggunaan seluruh sumber daya, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan anggaran (DIPA) maka Dinas PUPR menyusun laporan kinerja yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian tersebut menjelaskan mengenai capaian kinerja tahun ini, capaian kinerja tahun berjalan dibandingkan dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan, serta analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan programnya.

B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan serta Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan diatur dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didasarkan pada salah satu penjabaran visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dengan tugas untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 094 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya air, sistem irigasi primer dan sekunder;
- c. Pelaksanaan kebijakan pembangunan jalan dan jembatan;
- d. Pelaksanaan kebijakan pembangunan gedung, penataan bangunan, dan lingkungannya lintas daerah kabupaten/ kota;
- e. Pelaksanaan kebijakan peningkatan tenaga ahli konstruksi dan pengawasan kelembagaannya;
- f. Pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang daerah;
- g. Pelaksanaan kebijakan preservasi jalan dan jembatan;
- h. Pelaksanaan kebijakan penatagunaan dan penyelesaian sengketa pertanahan;
- i. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis; dan

j. Pengelolaan kesekretariatan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai unit pelaksana teknis yaitu Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula dan Laboratorium Bahan Konstruksi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0155 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.

Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang unit pengelolaan produksi dan distribusi air baku dan air curah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program pengelolaan produksi dan distribusi air baku dan air curah;
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan pelaksanaan produksi air baku dan air curah;
- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan pelayanan distribusi air baku dan air curah;
- d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan pengkajian dan pengujian kualitas air baku dan air curah;
- e. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pengembangan teknologi produksi dan distribusi air baku dan air curah;
- f. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan pelayanan informasi, kerja sama kemitraan operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta produksi dan distribusi air baku dan air curah; dan
- g. Pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketatausahaan.

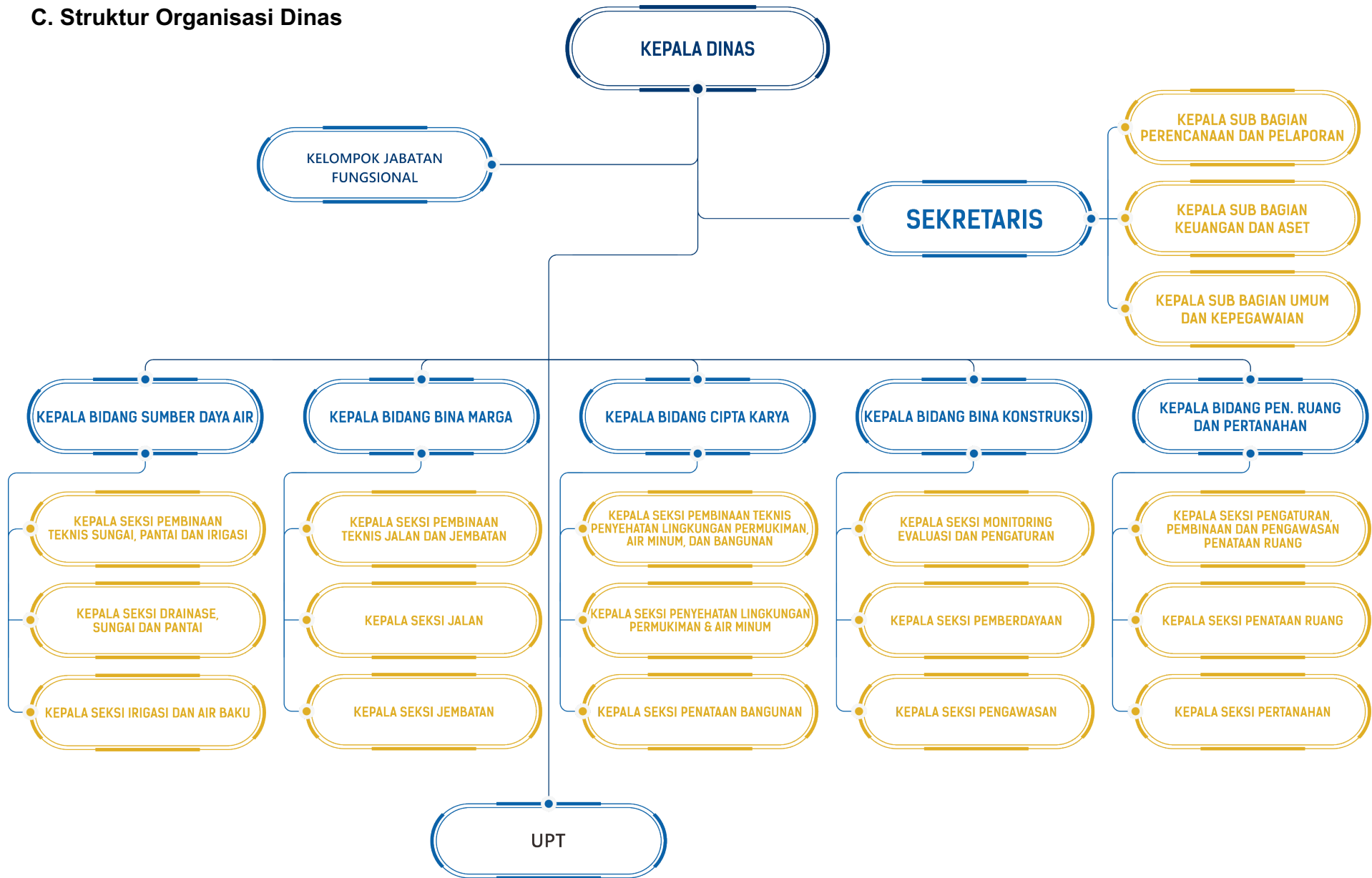
Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang pengujian serta pengendalian mutu/kualitas struktur dan bahan konstruksi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai fungsi;

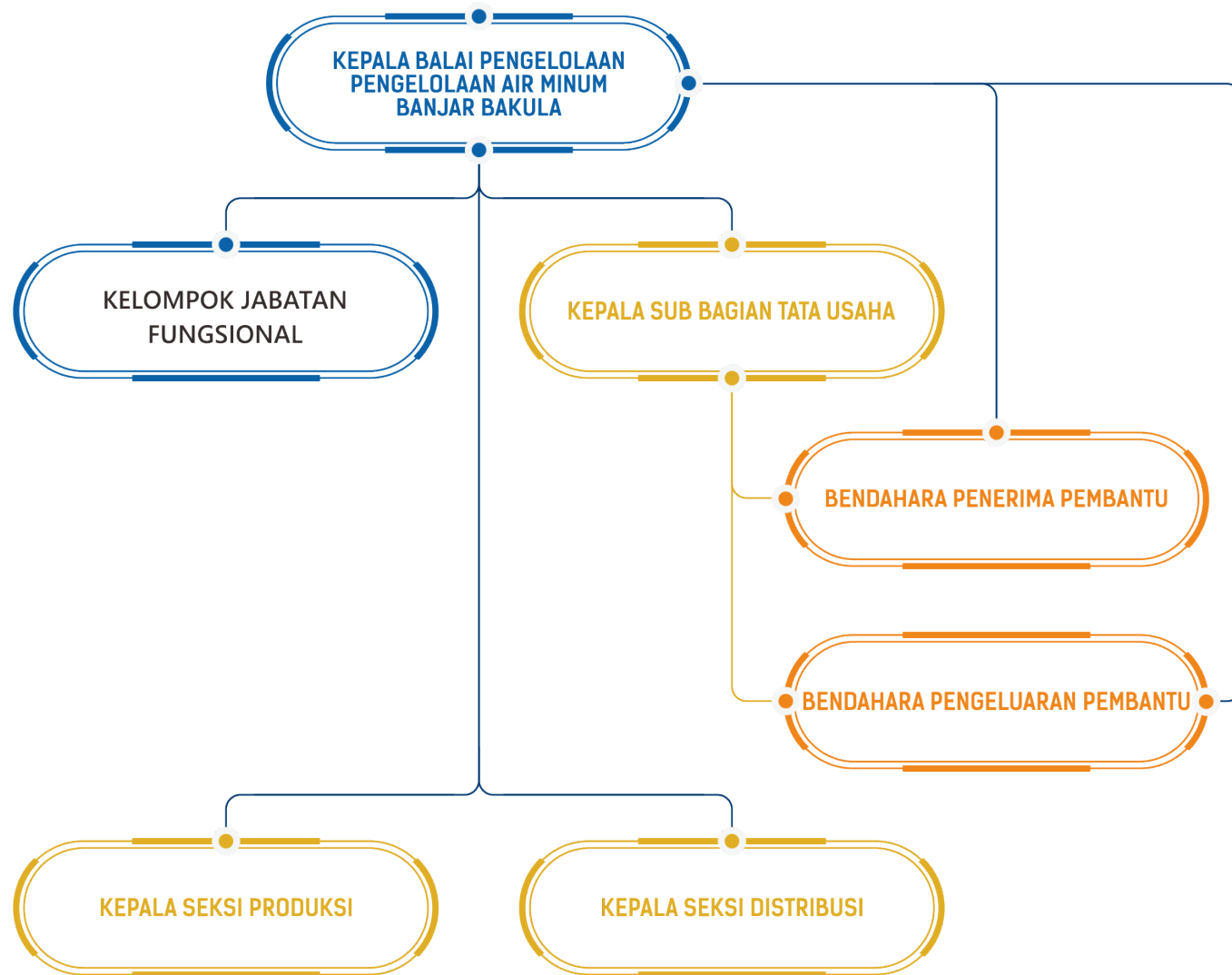
- a. penyusunan program penyelenggaraan pelayanan jasa Laboratorium Bahan Konstruksi;



- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengujian kualitas bahan konstruksi;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan pengujian struktur konstruksi;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kemitraan dan kerjasama penyelenggaraan pelayanan jasa Laboratorium Bahan Konstruksi;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengendalian mutu dan akreditasi Laboratorium Bahan Konstruksi; dan
- f. pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketatausahaan.

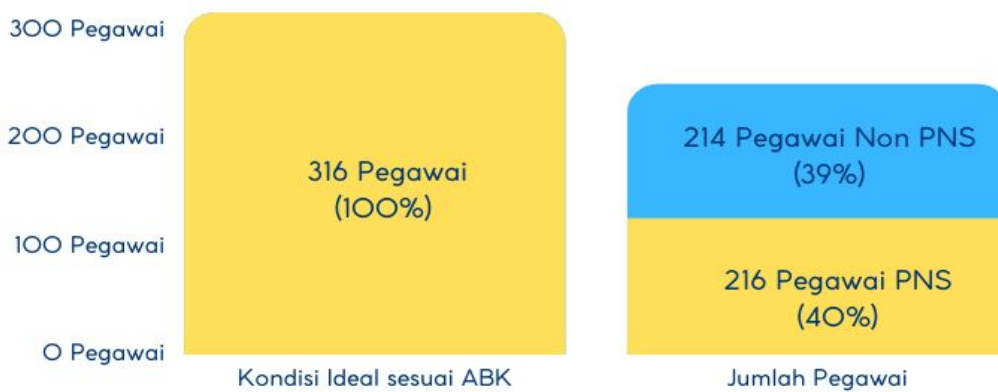
C. Struktur Organisasi Dinas







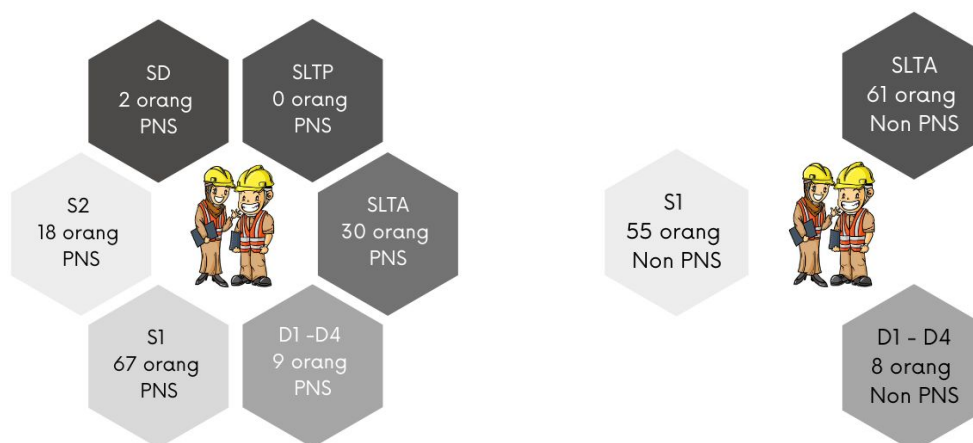
Sumber daya manusia atau dalam pemerintahan disebut dengan sumber daya aparatur adalah salah satu unsur penting bagi keefektifan berjalannya kegiatan didalam organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi. Pada tahun 2022, total Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas PUPR Prov Kalsel berjumlah 126 pegawai, jumlah PNS mengalami penurunan sebanyak 10 pegawai dari tahun 2021 karena terdapat pegawai yang memasuki masa pensiun. Jumlah PNS dirasa belum cukup memadai dibandingkan Analisis Beban Kerja (ABK) tahun 2021 dimana Dinas PUPR Prov Kalsel membutuhkan pegawai sejumlah 316 orang dari berbagai disiplin ilmu. Untuk itu, Dinas PUPR Prov Kalsel dibantu oleh pegawai non PNS sebanyak 124 pegawai.



Sumber: Kompilasi Data Unit Organisasi, 2022

Gambar 1.2. Perbandingan Jumlah Pegawai dan Kondisi Ideal ABK Dinas PUPR

PNS dan Non PNS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 250 pegawai yang jika dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, dan jenis kelamin adalah sebagai berikut:



Gambar 1.3. Jumlah Pegawai Sesuai Tingkat Pendidikan

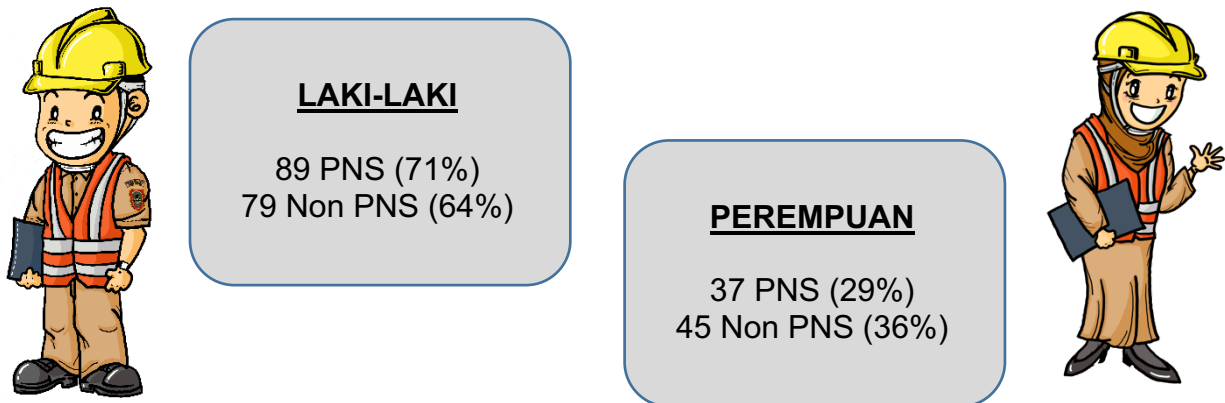
Berdasarkan gambar diatas dapat terlihat bahwa proporsi PNS Dinas PUPR yang sudah menempuh pendidikan perguruan tinggi sudah cukup tinggi yaitu sebesar 74,60%. Proporsi pegawai PNS Dinas PUPR dengan tingkat pendidikan SLTA atau dibawahnya sebesar 25,40%, namun diharapkan dapat melanjutkan sampai perguruan tinggi melalui izin belajar dan tugas belajar. Sedangkan, proporsi pegawai non PNS Dinas PUPR yang memiliki tingkat pendidikan SLTA atau dibawahnya mengalami penurunan dibanding tahun 2021 menjadi sebesar 49,19% dan yang telah menempuh perguruan tinggi sebesar 50,81%.

PNS Dinas PUPR Prov. Kalsel didominasi oleh golongan III yaitu 100 pegawai atau 68,97% dari total jumlah 145 pegawai, diikuti golongan II yaitu 18,6% dengan jumlah 27 pegawai, golongan IV yaitu 16 pegawai atau 11,03%, dan golongan I yaitu 2 pegawai atau 1,4 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas PUPR mayoritas diisi oleh SDM yang berkualitas pendidikan tinggi.



Gambar 1.4. Jumlah Pegawai Sesuai Golongan

Dari seluruh pegawai PNS Dinas PUPR yang ada, terdapat 71% pegawai laki-laki dan 29% pegawai perempuan. Sedangkan untuk pegawai non PNS, jumlah persentase pegawai laki-laki sebesar 64% dan pegawai perempuan sebesar 36%.



Gambar 1.5. Jumlah Pegawai Sesuai Gender

Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah, pegawai Dinas PUPR Prov Kalsel baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan maupun peranan dan tanggung jawab, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelemagaan PUG ke dalam budaya internal organisasi pemerintahan.

D. Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penentuan isu strategis Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan dengan mempertimbangkan permasalahan utama dan hasil telaah terhadap isu strategis global, nasional, dan regional yang relevan untuk pembangunan infrastruktur Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan infrastruktur PUPR merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang memperhatikan kualitas hidup, pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan (termasuk orang lanjut usia, pemuda, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, serta kelompok rentan lainnya), yang diperoleh dari indikator

kesetaraan akses, kontrol, partisipasi dalam pembangunan dalam memperoleh manfaat hasil-hasil pembangunan.

Tujuan umum dari pelaksanaan PUG-PUPR adalah memastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PU telah responsif gender.

2. Sustainable Development Goals (SDG's)

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur juga diharapkan mampu menunjang pencapaian target Sustainable Development Goals (SDG's) seperti pengurangan jumlah rumah tangga tanpa akses terhadap air minum dan sanitasi dasar.

3. Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 telah menyebar ke hampir semua negara di dunia dalam waktu yang sangat singkat dan berdampak pada kegiatan penyelenggaraan infrastruktur yang menyebabkan proses lelang di Dinas PUPR mengalami sedikit keterlambatan terkait verifikasi dokumen dikarenakan adanya pembatasan orang masuk, physical distancing, sehingga ruang gerak pokja/panitia lelang menjadi terbatas, distribusi barang dan tenaga kerja serta penyediaan faskes di lokasi proyek juga berpengaruh pada biaya konstruksi yang semakin meningkat. Selain itu pandemi COVID-19 juga berpengaruh pada waktu pelaksanaan pekerjaan.

4. Pemindahan Ibukota Negara

Dalam lima tahun ke depan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam rangka pemerataan pertumbuhan wilayah, maka direncanakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Pulau Kalimantan. Pembangunan Ibu kota Negara di luar pulau Jawa di posisi yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi, sebagai stimulus pertumbuhan perekonomian melalui peningkatan permintaan agregat, mendorong diversifikasi ekonomi Pulau Kalimantan, sumber pertumbuhan ekonomi baru jangka panjang terutama untuk Wilayah Pulau Kalimantan dan Kawasan Timur Indonesia, dan mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan diharapkan dapat membantu mendorong diversifikasi ekonomi dan peningkatan output sektor ekonomi non tradisional seperti jasa, pemerintahan, transportasi, perdagangan,

pengolahan akan terpacu untuk menopang pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan. Selain itu juga diharapkan terjadi peningkatan perdagangan antarwilayah, meningkatkan kesempatan kerja dan menurunkan ketimpangan pendapatan, serta menciptakan peluang investasi baru dan peningkatan kontribusi investasi Pulau Kalimantan terhadap nasional.

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur ini membutuhkan dukungan logistik kepada IKN dari wilayah sekitarnya termasuk Provinsi Kalimantan Selatan, untuk itu konektivitas IKN dalam konteks regional perlu disiapkan dengan baik oleh berbagai pihak termasuk Dinas PUPR Provinsi Kalsel.

5. Kemitraan Pembangunan Infrastruktur Skema KPBU

Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir, Dinas PUPR tidak pernah melakukan skema KPBU dalam pembiayaan pembangunan infrastrukturnya. KPBU sendiri merupakan salah satu alternatif pembiayaan selain melalui APBD dan APBN. KPBU juga merupakan indikator keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan. Apabila melihat dari sektor-sektor usaha yang ada di Kalimantan Selatan, skema KPBU ini sangat berpotensi untuk dilakukan.

6. Penyediaan infrastruktur yang terpadu

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur diharapkan mampu menyediakan infrastruktur yang terpadu untuk mendukung ketahanan pangan, ketahanan bencana, pengembangan konektivitas dan peningkatan kebutuhan terhadap layanan infrastruktur dasar dengan didukung oleh penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkualitas.

E. Sistematika Penyajian

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan singkat tentang latar belakang penyusunan, tugas pokok dan fungsi, urusan yang ditangani dan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan, yang menjalankan dan menjabarkan tugas pokok fungsi atas urusan yang ditangani.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar sasaran strategis jangka menengah dan penetapan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan,

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan uraian capaian kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan. Pengukuran kinerja yang dilaporkan pada bab ini yaitu menyajikan analisis pencapaian kinerja, keberhasilan dan dan kegagalan, sebagai pertanggungjawaban pencapaian hasil tahun 2022. Selain itu terdapat realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Untuk mewujudkan visi dan misi Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan menyusun Rencana Strategis 2022-2026 sebagai pedoman tolak ukur kinerja pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan yang mengarah dengan kebijakan dan program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJDP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022-2026.

Dengan pendekatan Renstra yang jelas dan bersinergi dalam menyelaraskan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas PUPR menetapkan Renstra 2022-2026 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan untuk program dan kegiatan serta sebagai pedoman dalam pengendalian kinerja dan dapat dipandang sebagai:

- Alat bantu bagi manajemen pengelolaan pelaksanaan dan pembinaan masyarakat untuk pembangunan provinsi Kalimantan Selatan;
- Gambaran tujuan dan sasaran, interpretasi serta strategi Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjawab tantangan dan tuntutan serta hasrat orang banyak;
- Alat untuk memicu dan memacu aparat bersama masyarakat dalam proses mencapai sasaran yang ingin dicapai.

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan selaras dengan visi dan misi Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan dalam rangka mencapai tujuan RPJMD tahun 2022-2026, Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan menyusun tujuan dan sasaran strategis melalui program dan kegiatannya.

Pada dasarnya pembangunan bidang ke-PUPR-an bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan, baik berupa prasarana dan sarana irigasi/ rawa, jalan/jembatan, lingkungan bersih dan sehat yang mantap, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan meningkatkan kelestarian sumberdaya alam dan keserasian lingkungan hidup. Sehingga Keberhasilan dalam pembangunan tersebut diharapkan dapat memberikan arah pertumbuhan wilayah dan pola tata ruang untuk



menggerakkan pertumbuhan perekonomian daerah serta mendorong kegiatan sektor lain yang akan memberikan kesempatan bekerja dan berusaha terutama di bidang konstruksi dan industri bahan bangunan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan tujuan strategis dan sasaran strategis yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, yaitu:

“Meningkatkan pembangunan yang terpadu melalui penyediaan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi & pengembangan wilayah”



Adapun sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan dalam waktu lima tahun sesuai RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUNAN					Target
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya ketersediaan air untuk mendukung kedaulatan pangan	Persentase Luas Fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi	%	50,70	49,70	55,60	56,30	57,00	62,70	62,70
2.	Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing	Tingkat Konektivitas Jalan Provinsi	%	63,64	66,72	69,83	72,93	76,13	78,85	78,85
	Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar	Cakupan layanan infrastruktur dasar	%	80,2	89,21	93,80	98,80	100	100	100
	Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor di tingkat Provinsi Kalsel	Nilai Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	80,50	81	82	83	84	85	85
	Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi Provinsi Kalsel	Tingkat Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi Provinsi Kalsel	%	31,20	24,73	33,56	47,18	59,60	67,99	67,99
	Meningkatnya kualitas tata kelola Dinas PUPR Provinsi Kalsel	Indeks tata kelola Dinas PUPR Provinsi Kalsel	%	94,05	94,64	94,74	94,84	94,94	95,04	95,04

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian kinerja telah dibuat oleh seluruh pejabat struktural Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan pada awal tahun 2022 sebagaimana lampiran dari dokumen ini. Dalam masa perjanjian kinerja, perjanjian kinerja dapat diperbaiki dalam hal terjadi pergantian atau mutasi pejabat, perubahan peraturan perundangan yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran ataupun dalam rangka perbaikan karena indikator kinerja yang ditetapkan kurang tepat.

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas (Eselon II) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya ketersediaan air untuk mendukung kedaulatan pangan	Persentase Luas Fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi	%	49,70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan
2.	Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing	Tingkat Konektivitas Jalan Provinsi	%	66,72	
3.	Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar	Cakupan layanan infrastruktur dasar	%	89,21	
4.	Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur antar daerah, antar sektor di Provinsi Kalsel	Nilai Penyelenggaraan Penataan Ruang PUPR antar tingkat	%	81	



5.	Meningkatnya kapasitas pengendalian konstruksi dan kualitas konstruksi Provinsi Kalsel	Tingkat Pelaksanaan Provinsi Kalsel	Pengendalian Konstruksi	%	24,73
6.	Meningkatnya kualitas tata kelola Dinas PUPR Provinsi Kalsel	Indeks tata kelola PUPR Provinsi Kalsel	Dinas	%	94,64
7.					
8.					

Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang (Eselon III) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	85,71	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Sekretariat)
2	Meningkatnya Pelayanan sarana dan prasarana administrasi perkantoran	Tingkat kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	%	100	
3	Meningkatnya Pelayanan administrasi keuangan	Persentase aset yang tercatat	%	100	
4	Meningkatnya Infrastruktur pemanfaatan sumber daya air	Persentase infrastruktur irigasi dalam kondisi baik	%	54,03	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Sumber Daya)
		Persentase pengendali daya rusak air dalam kondisi baik	%	29,02	
		Persentase Kapasitas Penyediaan Air Baku	%	18,11	
5	Meningkatnya infrastruktur jalan provinsi	Tingkat Kemantapan Jalan	%	80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Bina Marga)
		Tingkat Aksesibilitas Jalan	%	35,75	
6	Meningkatnya infrastruktur keciptakarya yang dapat diakses oleh masyarakat	Cakupan pelayanan air minum yang Layak	%	88,68	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Cipta Karya)
		Cakupan pelayanan air limbah yang layak	%	90	
		Persentase sarana dan prasarana Bangunan Gedung dalam kondisi baik	%	100	



		Persentase sarana dan prasarana Bangunan dan Lingkungannya dalam kondisi baik	%	100	
7	Meningkatnya kualitas Jasa Konstruksi dan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi	Persentase Pemda di Provinsi yang Menginput Informasi Jasa Konstruksi dalam SIPJAKI dengan lengkap	%	70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Bina Konstruksi)
		Persentase Meningkatnya kualitas SDM Jasa Konstruksi yang Kompeten dan bersertifikat	%	18	
		Persentasi Meningkatnya tertib Jasa Konstruksi	%	5	
8	Meningkatnya kepatuhan terhadap RTRW	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	86	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan)
		Persentase Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu	%	20	
		Persentase penyelesaian sengketa tanah Garapan selesai tepat waktu	%	20	
		Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan selesai tepat waktu	%	20	
		Persentase asset tanah Provinsi untuk	%	20	



infrastruktur yang
dibebaskan oleh Seksi
Pertanahan Dinas
PUPR

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Seksi (Eselon IV) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung jawab
1	Tersedianya Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen perencanaan yang telah ditentukan	Dok	3	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Bidang Sekretariat
		Jumlah dokumen pelaporan yang telah ditentukan	Dok	3	
2	Tersusunnya perencanaan dan administrasi keuangan dan aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala	Dok	6	Sub Bagian Keuangan dan Aset Bidang Sekretariat
3	Terlaksananya sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan	%	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bidang Sekretariat
		Jumlah SDM yang mengikuti sosialisasi, bintek, Pendidikan dan pelatihan	Orang	3	
4	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan SDA yang Ditindaklanjuti	dok	5	Seksi Pembinaan Teknis Sungai, Pantai dan Irigasi Bidang Sumber Daya Air
5	Terlaksananya Pembangunan Daerah Irigasi/Rawa	Panjang jaringan irigasi/rawa yang baru dibangun yang berkualitas	m	2.000	Seksi Irigasi dan Air Baku



6	Terlaksananya Pengelolaan Daerah Irigasi/Rawa Kewenangan (Rehabilitasi dan OP)	Jumlah daerah irigasi/rawa kewenangan yang direhabilitasi dan dipelihara yang berfungsi	DIR	34	
			DI	7	
7	Terlaksananya Penyediaan Prasarana Air Baku	Jumlah Prasarana air baku yang dibangun yang berkualitas	Buah	18	
8	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sungai, Pantai dan Drainase	Panjang dan Jumlah bangunan pengendali banjir dan pengaman pantai yang dibangun yang berkualitas	m	100	Seksi Drainase, Sungai, dan Pantai
9	Terlaksananya Pengelolaan Pengendali banjir (Sungai, Pantai dan Drainase)	Panjang dan jumlah bangunan pengendali banjir dan pengaman pantai yang dibangun dan direhabilitasi	km	17	
10	Terlaksananya pengelolaan tampungan air embung, situ, waduk	Jumlah tampungan air embung, situ, waduk yang dikelola yang berfungsi	buah	1	
11	Tersedianya Perencanaan dan Pengendalian Program Kebina Margaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Bidang Bina Marga yang ditindaklanjuti	dok	16	Seksi Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga
12	Terlaksananya Pembangunan Jalan sesuai dengan standar bina marga	Panjang Jalan yang di bangun yang berkualitas	km	47,13	Seksi Jalan Bidang Bina Marga
13	Terlaksananya Pembangunan Jembatan sesuai dengan standar bina marga	Jembatan yang di bangun dan direhabilitasi yang berkualitas	buah	6	Seksi Jembatan Bidang Bina Marga
14	Terlaksananya pembinaan teknis keciptakaryaan	Jumlah kab/kota yang dibina terkait keciptakaryaan	Kab/kota	13	Seksi Pembinaan Teknis Penyehatan Lingkungan, Air Minum dan Bangunan Bidang Cipta Karya
15	Tersedianya Perencanaan dan Pengendalian Program Keciptakaryaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Keciptakaryaan yang ditndaklanjuti	dok	25	
16	Terlaksananya Kerjasama dengan	Jumlah Kerjasama dengan Satuan Kerja/	Dokumen	20	Seksi Penataan Bangunan



	satuan kerja/ unit kerja/ instansi terkait bidang Keciaptakaryaan	Unit Kerja/ Instansi terkait bidang Keciaptakaryaan sesuai pedoman keciaptakaryaan			Bidang Cipta Karya
17	Terbangunnya Bangunan Gedung dan Lingkungan	Jumlah bangunan Gedung dan lingkungan untuk kepentingan strategi daerah provinsi yang dibangun berkualitas	unit	4	
		Jumlah bangunan Gedung dan lingkungan untuk kepentingan strategis daerah provinsi yang dilakukan rehabilitasi, renovasi dan ubahsuai	unit	5	
18	Terlaksananya pembinaan teknis keciaptakaryaan	Jumlah SDM yang terbina terkait keciaptakaryaan	Orang	50	
19	Tersedianya perencanaan dan pengendalian program keciaptakaruaan	Jumlah dokumen teknis keciaptakaryaan	Dokumen	2	
20	Tersedianya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana Air Minum dan Air Limbah	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Air Minum	Unit	5	Seksi Penyehatan Lingkungan, Air Minum dan Bangunan Bidang Cipta Karya
		Jumlah dokumen kajian teknis air minum	Dok	4	
		Jumlah dokumen kajian teknis air limbah	Dok	1	
		Jumlah kabupaten / kota yang dibina terkait air minum dan air limbah	Kab/kota	13	
21	Terlaksananya Pemberdayaan SDM Profesional yang kompeten di	Jumlah SDM / Tenaga Ahli Jasa Konstruksi yang kompeten baik laki-laki maupun perempuan	orang	140	Seksi Pemberdayaan Bidang Bina Konstruksi



	bidang jasa konstruksi	Jumlah dokumen Analisa kebutuhan pelatihan yang memanfaatkan selama 5 tahunan	dokumen	2	
		Jumlah kab/kota yang terbina terkait jasa konstruksi	Kab/ kota	13	
22	Terlaksananya Pembinaan dan monitoring Evaluasi Pengaturan Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen laporan SIPJAKI yang akurat dan terintegrasi	dok	2	Seksi Monev & Pengaturan Bidang Bina Konstruksi
		Jumlah Kabupaten/kota yang melaksanakan Sistem SIPJAKI sesuai dengan peraturan yang berlaku	Kab/kota	13	
23	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan tertib Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen Pedoman Jasa Konstruksi yang dimanfaatkan	dok	1	Seksi Pengawasan Bidang Bina Konstruksi
		Jumlah dokumen laporan pengawasan bidang lingkup Dinas PUPR Prov. Kalsel sesuai Pedoman Jasa Konstruksi	dok	1	
24	Tersedianya Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah rekomendasi dan evaluasi gubernur terhadap rencana umum dan rencana tata ruang kabupaten/kota yang ditindaklanjuti	dok	3	Seksi Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Penataan Ruang Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
		Jumlah dokumen perencanaan, pengaturan, pembinaan dan pengawasan penataan ruang yang ditindaklanjuti	dok	3	
		Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penataan Ruang	Orang	60	
		Jumlah informasi tata ruang yang dipublikasikan	Dok	1	
		Jumlah laporan TKPRD	Lap	1	
25	Terlaksananya penataan ruang wilayah provinsi dan	Jumlah keterangan pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti	dok	2	Seksi Penataan Ruang



	pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang provinsi	Jumlah dokumen program pemanfaatan ruang yang tersinkronisasi	dok	2	Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
26	Terlaksananya pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi	Jumlah Luasan Pengadaan Tanah di Tahun Berjalan	ha	20	Seksi Pertanahan
		Jumlah Dokumen Pengadaan Tanah, Penyelesaian Sengketa Lahan, Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kalsel, dan Pembinaan Kabupaten/Kota	dok	4	
		Persentase kepemilikan lahan atas nama pemerintah provinsi Kalsel yang bersertifikat dalam 5 tahun	%	20	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu komponen yang terdiri dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun untuk memenuhi salah satu komponen dari akuntabilitas kinerja dan penyusunannya berdasarkan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan. Penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan sudah berdasar kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0106 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam penyusunannya ini masih banyak dijumpai berbagai hambatan, antara lain pengumpulan data kinerja yang tersebar pada berbagai unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan. Namun demikian, beberapa kegiatan kunci yang mempunyai nilai strategis tinggi telah dapat diukur kinerjanya, sehingga secara umum ketidakadaan informasi kinerja pada beberapa kegiatan tidak mempengaruhi capaian kinerja organisasi secara umum.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran, dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Metode seperti ini sangat bermanfaat dalam upaya memberikan gambaran kepada pihak lain tentang pelaksanaan upaya organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran. Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi enam kategori sebagai berikut:

Tabel III.1.

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 90%	Sangat Memuaskan
II	Diatas 80% sampai dengan 90%	Memuaskan
III	Diatas 70% sampai dengan 80%	Sangat Baik
IV	Diatas 60% sampai dengan 70%	Baik
V	Diatas 50% sampai dengan 60%	Cukup
VI	Kurang dari 50%	Kurang

Sumber : Tim Evaluator LAKIP

1. Sasaran RPJMD

Capaian kinerja RPJMD yang diampu oleh Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Capaian kinerja Dinas PUPR tahun 2021 adalah sangat memuaskan dengan nilai 104,52%, sebagai berikut:

Tabel III.2. Capaian Kinerja RPJMD dan Kepala Dinas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
SS.1	Terwujudnya pembangunan Kawasan-kawasan strategis berdasarkan keseimbangan keruangan	Persentase kesesuaian Tata Ruang	83,50%	84%	100,60%
Kinerja Dinas PUPR mendukung RPJMD					100,60%

Sumber: Hasil Perhitungan Tim Penyusun, 2022

Rumus Perhitungan:

a. Persentase Kesesuaian Tata Ruang

$$x = \frac{\text{Program dan Kegiatan RTRW YANG SEDUAI DENGAN RPJMD}}{\text{Program Kegiatan RTRW (5 TAHUN PERTAMA)}} \times 100\%$$

Tabel III.3. Perbandingan Capaian Kinerja RPJMD

NO	INDIKATOR	REALISASI					TAHUN 2022		
		2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	%Capaian
1.	Persentase kesesuaian Tata Ruang	n/a	n/a	n/a	n/a	83	83,50%	84%	100,60%
RATA RATA CAPAIAN									100,60%

Sumber: Hasil Perhitungan Tim Penyusun, 2022

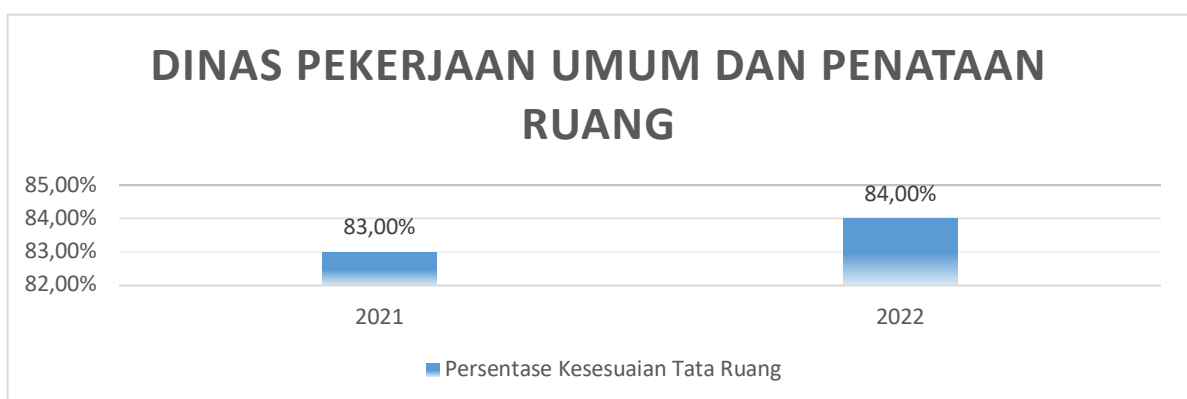
1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Persentase Kesesuaian Tata Ruang

Realisasi indikator persentase kesesuaian tata ruang pada tahun 2022 yaitu sebesar 84% dari target 83,50% sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerjanya telah melampaui target dengan capaian sebesar 100,60%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait (Time Series)

Tabel III.4. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait



Persentase Kesesuaian Tata Ruang

Indikator persentase kesesuaian tata ruang merupakan indikator yang baru disusun untuk RPJMD 2022-2026 sehingga perbandingannya hanya dengan tahun 2021 sebagai baseline penyusunan indikator, jika dibandingkan dari tahun 2021 kesesuaian tata ruang mengalami peningkatan.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Persentase Kesesuaian Tata Ruang

Kebijakan pembangunan harus saling terkait antara rencana tata ruang dan rencana pembangunan dimana tujuan, strategi, program satu sama lain saling mendukung sehingga kebijakan pembangunan kebijakan tersebut saling mendukung dan saling mengisi satu sama lain guna mencapai konsistensi dan keselarasan. Dalam merencanakan pembangunan terutama dalam pembuatan rencana kebijakan, strategi dan programnya harus mengacu pada dokumen spasialnya yaitu Dokumen RTRW wilayah tersebut. Selain itu program tersebut harus selaras juga dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, agar program-program yang dibuat sesuai dengan kondisi wilayah tersebut dan sesuai dengan arah pengembangan kota yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan agar program-program pembangunan yang direncanakan tersebut nantinya sesuai, tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- Hambatan
 - Tingginya ego sektoral dan konflik kepentingan dalam perumusan kebijakan tata ruang dan pembangunan
 - Keterbatasan Alokasi anggaran daerah yang berimplikasi terhadap pengurangan jumlah program kegiatan RTRW yang dapat dilaksanakan. Sehingga pelaksanaan program Kegiatan RTRW kadang tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan RPJMD.
- Rencana Tindak Lanjut
 - Perlunya Focus Group Discussion dengan stakeholder Forum Penataan Ruang terkait perumusan indikasi program pada kebijakan tata ruang dan kebijakan pembangunan
 - Perlunya sinkronisasi program-program prioritas mana tiap tahunnya untuk dapat memaksimalkan penggunaan Anggaran

4. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian Persentase Kesesuaian Tata Ruang tidak lepas dari dukungan program dan kegiatan yang terlaksana pada tahun 2022, antara lain:

- a. **Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan**, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Program Penyelesaian Ganti

Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, dan Program Penatagunaan Tanah

2. Sasaran Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian kinerja Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan didukung oleh 6 (ENAM) sasaran strategis yang telah diperjanjikan oleh Kepala Dinas PUPR di dalam Perjanjian Kinerja Revisi tahun 2022. Capaian kinerja Dinas PUPR tahun 2021 adalah sangat memuaskan dengan nilai 104,52%, sebagai berikut:

Tabel III.5. Capaian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
SS.1	Meningkatnya ketersediaan air untuk mendukung kedaulatan pangan	Persentase Luas Fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi	49,70%	49,87%	100,35%
SS.2	Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing	Tingkat Konektivitas Jalan Provinsi	66,72%	67,87%	101,71%
SS.3	Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar	Cakupan layanan infrastruktur dasar	89,21%	88,52%	99,23%
SS.4	Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor di tingkat Provinsi Kalsel	Nilai Penyelenggaraan Penataan Ruang	81%	80%	98,77%
SS.5	Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi Provinsi Kalsel	Tingkat Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi Provinsi Kalsel	24,73%	28,04%	113,4%

SS.6	Meningkatnya kualitas tata kelola Dinas PUPR Provinsi Kalsel	Indeks tata kelola Dinas PUPR Provinsi Kalsel	97,14%	96,86%	99,71%
SS.7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	88	86,96	98,82%
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang Dicanangkan	1	1	100%
Kinerja Dinas PUPR					103,09%

Sumber: Hasil Perhitungan Tim Penyusun, 2022

Rumus Perhitungan:

a. Persentase Luas Fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi

$$x = \frac{\text{Luas fungsional daerah irigasi kewenangan propinsi yang dikerjakan pada tahun berjalan}}{\text{luas fungsional total daerah irigasi kewenangan propinsi}} \times 100\%$$

b. Tingkat Konektivitas Jalan Provinsi

$$x = \frac{(\text{Kemantapan Jalan} * 70\%) + (\text{Aksesibilitas jalan} * 30\%)}{100\%}$$

c. Cakupan layanan infrastruktur dasar

Cara Perhitungan :

$$\frac{\sum \text{PALD}}{\sum \text{JPT}} \times 100\%$$

Keterangan:

PALD = Proporsi Populasi yang memiliki akses terhadap layanan air limbah domestik layak

JPALD = Jumlah populasi dengan akses terhadap layanan air limbah domestik layak

JPT = Jumlah populasi seluruhnya

$$\frac{\sum \text{PAM}}{\sum \text{JPT}} \times 100\%$$

Keterangan:

PAM = Proporsi Populasi yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak/aman

JPAM = Jumlah populasi dengan akses terhadap sumber air minum layak/aman

JPT = Jumlah populasi seluruhnya

Pembobotan Air Minum = 60% dan Air Limbah Domestik = 40%, sehingga Cakupan infrastruktur dasar ke-PU-an sebagai berikut:

$$\text{Cakupan Layanan Infrastruktur Dasar} = (60\% \times \sum \text{PAM}) + (40\% \times \sum \text{PALD})$$

d. Nilai Penyelenggaraan Penataan Ruang

$$x = \frac{(Aspek Pengaturan Penataan Ruang * 20) + (Aspek Pembinaan Penataan Ruang * 25) + (Aspek Perencanaan Penataan Ruang * 25) + (Aspek Pemanfaatan Penataan Ruang * 20) + (Aspek Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang * 10)}{100}$$

e. Tingkat Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi Provinsi Kalsel

Cara Perhitungan :

$$X = \frac{(20 * ISP.11) + (50 * ISP.12) + (30 * ISP13)}{100}$$

Ket:

ISP.11 (Perhitungan Persentase Pengembangan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi yang terintegrasi melalui 3 layanan dasar (SIPJAKI))

ISP.12 (Persentase Meningkatnya kualitas SDM Jasa Konstruksi yang Kompeten dan bersertifikat)

ISP.13 (Persentasi Meningkatnya tertib Jasa Konstruksi)

f. Indeks tata kelola Dinas PUPR Provinsi Kalsel

$$x : (20\% \times \text{Nilai SAKIP}) + (50\% \times \text{Tingkat kepuasan layanan kesekretariatan}) + (30\% \times \text{persentase aset yang tercatat})$$

Tabel III.6. Perbandingan Capaian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI				TAHUN 2022		
		2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	%Capaian
1.	Persentase Luas Fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi					49,70%	49,87%	100,35%
2.	Tingkat Konektivitas Jalan Provinsi					66,72%	67,87%	101,71%
3.	Cakupan layanan infrastruktur dasar					89,21%	88,52%	99,23%

4.	Nilai Penyelenggaraan Penataan Ruang	81%	80%	98,77%
5.	Tingkat Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi Provinsi Kalsel	24,73%	28,04%	113,4%
6.	Indeks tata kelola Dinas PUPR Provinsi Kalsel	94,64%	96%	101,44%
7.	Nilai IKM	88	86,96	98,82%
8.	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang Dicanangkan	1	1	100%

Sumber: Hasil Perhitungan Tim Penyusun, 2022

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

- Sasaran strategis “*Meningkatnya ketersediaan air untuk mendukung kedaulatan pangan*” (SS.1) dengan indikator :
Persentase Luas Fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi
Realisasi indikator persentase luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi pada tahun 2022 yaitu sebesar 49,87% dari target 49,70% sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerjanya telah melampaui target dengan capaian sebesar 100,35%.
- Sasaran strategis “*Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing*” (SS.2) dengan indikator :
Tingkat Konektivitas Jalan Provinsi
Realisasi indikator Tingkat Konektivitas Jalan Provinsi pada tahun 2022 yaitu sebesar 67,87% dari target 66,72% sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerjanya telah melampaui target dengan capaian sebesar 101,71%.
- Sasaran strategis “*Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar*” (SS.3) dengan indikator :

Cakupan layanan infrastruktur dasar

Realisasi indikator Cakupan layanan infrastruktur dasar pada tahun 2022 yaitu sebesar 49,87% dari target 49,70% sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerjanya telah melampaui target dengan capaian sebesar 100,35%.

- Sasaran strategis *“Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor di tingkat Provinsi Kalsel”* (SS.4) dengan indikator :

Nilai Penyelenggaraan Penataan Ruang

Realisasi indikator Nilai Penyelenggaraan Penataan Ruang pada tahun 2022 yaitu sebesar 80% dari target 81% sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerjanya belum mencapai target dengan capaian sebesar 98,77%.

- Sasaran strategis *“Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi Provinsi Kalsel”* (SS.1) dengan indikator :

Tingkat Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi Provinsi Kalsel

Berdasarkan hasil perhitungan diatas diperoleh prosentasi Tingkat Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 28,04%. Nilai tersebut lebih tinggi dari target dalam perencanaan strategis Dinas PUPR Prov. Kalimantan Selatan 2022-2026 yakni sebesar 24,73 %. Sehingga diketahui capaian yang diperoleh sebesar 113,4%.

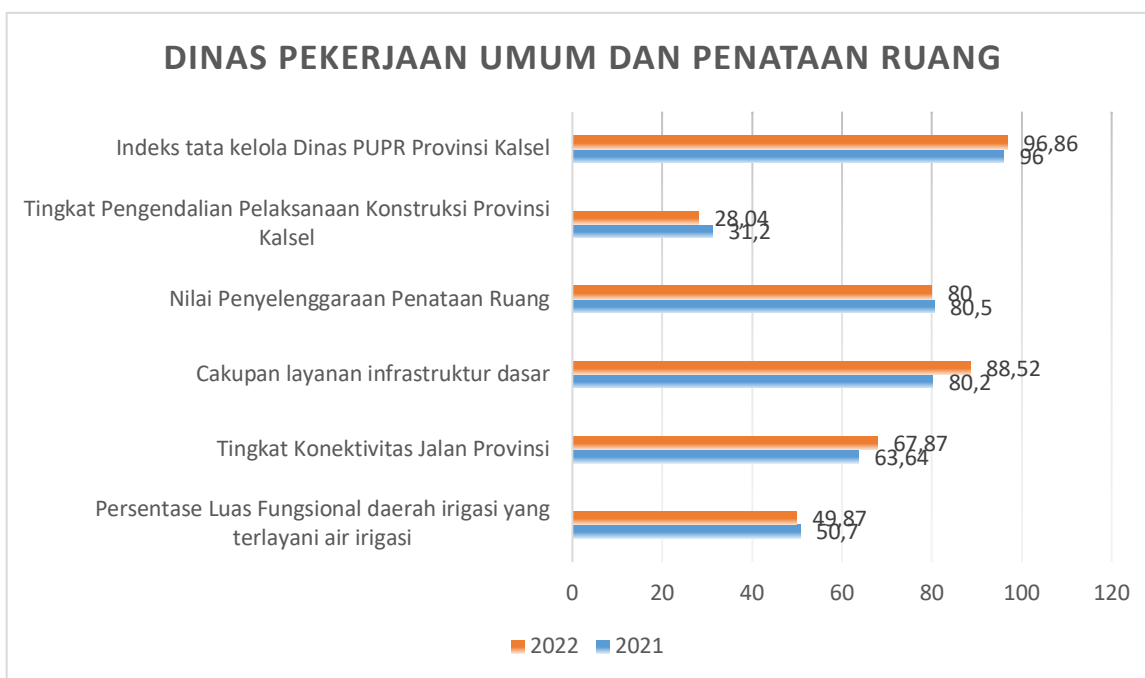
- Sasaran strategis *“Meningkatnya kualitas tata kelola Dinas PUPR Provinsi Kalsel”* (SS.6) dengan indikator :

Indeks tata kelola Dinas PUPR Provinsi Kalsel

Realisasi indikator Indeks tata kelola Dinas PUPR Provinsi Kalsel pada tahun 2022 yaitu sebesar 96,86% dari target 97,14% sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerjanya belum mencapai target dengan capaian sebesar 99,71%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait (Time Series)

Tabel III.7. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait



Persentase Luas Fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi

Adanya perbedaan besaran prosentase baseline disebabkan karena nilai pembagi pada renstra 2022-2026 mempertimbangkan jumlah penambahan luasan yang didapatkan dengan penambahan luasan yang dapat terlayani pada daerah irigasi yang baru.

Tingkat Konektivitas Jalan Provinsi

Realisasi indikator Tingkat Konektivitas Jalan Provinsi pada tahun 2022 yaitu sebesar 70,27% dari target 66,72% sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerjanya telah melampaui target dengan capaian sebesar 105,32%.

Cakupan layanan infrastruktur dasar

Indikator cakupan pelayanan infrastruktur dasar ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 4,07% dan gap terhadap target sebesar 0,77% di tahun 2022.

Nilai Penyelenggaraan Penataan Ruang

Realisasi indikator Nilai Penyelenggaraan Penataan Ruang pada tahun 2022 yaitu sebesar 80% dari target 81% sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerjanya belum mencapai target dengan capaian sebesar 98,77%.

Tingkat Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi Provinsi Kalsel

Berdasarkan data tahun 2021 realisasi yang dicapai adalah 32,7%. Terdapat penurunan realisasi dan capaian pada tahun 2022 ini menjadi hanya 28,04%. Hal ini dikarenakan adanya perubahan dasar perhitungan di beberapa indikator variabel pendukung.

Indeks tata kelola Dinas PUPR Provinsi Kalsel

Realisasi indikator Indeks tata kelola Dinas PUPR Provinsi Kalsel pada tahun 2022 yaitu sebesar 96% dari target 94,64% sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerjanya telah melampaui target dengan capaian sebesar 101,44%.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Persentase Luas Fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi

Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target yaitu dengan melaksanakan operasi dan pemeliharaan di beberapa daerah irigasi.

Penurunan kinerja dari tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 hal ini disebabkan karena beberapa luasan setelah ditelusuri beralih komoditas tanaman selain sawah. Adapun upaya meningkatkan target capaian kinerja yaitu berkoordinasi dengan Dinas Pertanian terkait persiapan cetak sawah pada saluran irigasi baru yang sudah dikerjakan dan meningkatkan kualitas Operasi dan Pemeliharaan pada Daerah Irigasi Kewenangan yang sudah terbangun untuk meningkatkan luas areal sawah yg berfungsi.

Tingkat Konektivitas Jalan Provinsi

Realisasi indikator Tingkat Konektivitas Jalan Provinsi pada tahun 2022 yaitu sebesar 70,27% dari target 66,72% sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerjanya telah melampaui target dengan capaian sebesar 105,32%.

Cakupan layanan infrastruktur dasar

Dalam rangka pencapaian universal access air minum dan air limbah domestik, pemerintah pusat melalui RPJMN Tahun 2020 – 2024 telah menargetkan pencapaian akses air minum layak 100% dengan 15% diantaranya akses aman, dan akses layak air limbah domestik yaitu 90% dengan 20% diantaranya merupakan akses aman pada tahun 2024.

Target akses air minum layak Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 sama dengan target RPJMN yaitu 100% layak dan 15% diantaranya akses aman, dan target akses layak air limbah domestik yaitu 87% dengan 6% diantaranya merupakan akses aman. Sedangkan capaian eksisting akses air minum layak Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 yaitu sebesar 88,68% dan akses layak air limbah domestik sebesar 88,28%. dari capaian eksisting tersebut diketahui bahwa sektor air minum yang masih terdapat gap sehingga perlu upaya percepatan pencapaian target akses air minum layak sebesar 11,32% untuk menuju universal access di tahun 2024.

Nilai Penyelenggaraan Penataan Ruang

Upaya Yang Telah Dilakukan

- Percepatan Penyusunan Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Selatan Kegiatan Asistensi dengan Intens yang melibatkan Kementerian ATR/BPN serta percepatan rekomendasi Peta Dasar oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
- Sinkronisasi Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Selatan dengan RZWP3K Menyelaraskan kegiatan pemanfaatan ruang darat dan ruang laut agar terciptanya penataan ruang yang efektif, efisien dan berkesinambungan
- Sosialisasi NSPK Penataan Ruang Melakukan updating dan transfer ilmu kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Peraturan Perundang- undangan terbaru.
- Pendampingan Penyusunan RDTR dan RTRW di Kabupaten dan Kota Melakukan monitoring penyusunan RDTR dan RTRW Kabupaten/Kota agar terciptanya keterpaduan pemanfaatan ruang antar produk rencana tata ruang

Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

- Percepatan Penyusunan Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Selatan Updating Data dan Informasi yang Memiliki relevansi dengan kondisi eksisting pemanfaatan ruang
- Sinkronisasi Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Selatan dengan RZWP3K Updating Data dan Informasi kondisi garis pantai
- Sosialisasi NSPK Penataan Ruang Dinamika perubahan kebijakan di tingkat Pemerintah Pusat

- Pendampingan Penyusunan RDTR dan RTRW di Kabupaten dan Kota
Proses penyusunan dan persetujuan substansi dengan Pemerintah Pusat yang menyita waktu yang relative lebih lama

Rencana Tindak Lanjut

- Percepatan Penyusunan Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Selatan, Pengumpulan dan Updating Data dan Informasi yang Memiliki relevansi dengan kondisi eksisting pemanfaatan ruang
- Sinkronisasi Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Selatan dengan RZWP3K, Sinkronisasi Data dan Informasi kondisi garis pantai
- Sosialisasi NSPK Penataan Ruang, Penyesuaian produk rencana tata ruang dengan perubahan kebijakan di tingkat Pemerintah Pusat
- Pendampingan Penyusunan RDTR dan RTRW di Kabupaten dan Kota Melibatkan stakeholders terkait dalam hal ini Forum Penataan Ruang Daerah dan Provinsi untuk percepatan penyusunan RDTR dan RTRW
- Menyusun Instrumen-instrumen untuk mendukung pelaksanaan KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK; penilaian perwujudan RTR; pemberian Insentif dan Disinsentif; pengenaan Sanksi Administratif; dan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang.

Tingkat Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi Provinsi Kalsel

Terjadinya penurunan kinerja disebabkan adanya perbedaan dan perubahan dasar perhitungan dan pertimbangan target dalam perencanaan strategis yang berjalan, yakni 2022-2026. Perbedaan ini juga didasari adanya perubahan metode dan mekanisme pelaksanaan akibat ada perubahan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang melandasinya. Perubahan tersebut antara lain:

- a. Perubahan/perbaikan dan penambahan fitur-fitur dalam aplikasi Sipjaki yang baru. Perubahan tersebut telah disosialisasikan pada Bulan November 2022.
- b. Pedoman Pengawasan Jasa Konstruksi sudah mulai menerapkan Peraturan Menteri PUPR tentang Pedoman NSPK Pengawasan Jasa Konstruksi yang baru.

Indeks tata kelola Dinas PUPR Provinsi Kalsel

Realisasi indikator Indeks tata kelola Dinas PUPR Provinsi Kalsel pada tahun 2022 terus mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan terus meningkatnya nilai SAKIP Dinas PUPR.

4. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian sasaran strategis yang dimiliki oleh Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan yaitu *"Meningkatnya Infrastruktur ke-PU-an dan Penataan Ruang"* tidak lepas dari dukungan program dan kegiatan yang terlaksana pada tahun 2021, antara lain:

1. **Bidang Sumber Daya Air**, Program Pengelolaan Sumber Daya Air
2. **Bidang Bina Marga**, Program Penyelenggaraan Jalan
3. **Bidang Cipta Karya**, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
4. **Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan**, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, dan Program Penatagunaan Tanah
5. **Bidang Bina Konstruksi**, Program Pengaturan Jasa Konstruksi
6. **Bidang Kesekretariatan**, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

2. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan bertanggung jawab atas sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Hal ini berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai. Sasaran Bidang Sumber Daya Air diatas dalam rangka mendukung RPJMD Kalsel Tahun 2022 - 2026 berupa Kalsel Infrastruktur berkualitas, Kalsel Sentra Pangan, Kalsel lingkungan berkualitas. Selama periode RPJMD (lima) tahun terakhir hingga tahun 2021 telah dilaksanakan program Pengelolaan Sumber Daya Air, terutama pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa, yang dibiayai melalui dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan.

Sasaran ini diukur dari aspek Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik pengelolaan irigasi yang meliputi kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan daerah irigasi guna meningkatkan, mempertahankan dan memperbaiki kinerja pelayanan jaringan irigasi dalam memenuhi kebutuhan air irigasi, baik pada irigasi permukaan maupun irigasi rawa.

Tabel III.8 Capaian Kinerja Kepala Bidang Sumber Daya Air

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
SP.1	Meningkatnya Infrastruktur Pemanfaatan Sumber Daya Air	1. Persentase Infrastruktur Irigasi Dalam Kondisi Baik	54,03%	53,95	99,85%
		2. Persentase Pengendali Daya Rusak Air Dalam Kondisi Baik	29,02%	31,58	108,81%
		3. Persentase Kapasitas Penyediaan Air Baku	18,11%	18,11	100%
Rata-Rata Capaian					102,89%

Sumber: Hasil Perhitungan dari Bidang Sumber Daya Air, 2022

Rumus Perhitungan:

a. Persentase Infrastruktur Irigasi dalam kondisi baik

$$x = \frac{\text{Panjang infrastruktur jaringan Irigasi primer sampai dengan sekunder dalam Kondisi Rusak}}{\text{total panjang infrastruktur jaringan irigasi primer sampai dengan sekunder yang menjadi kewenangan provinsi}} \times 100\%$$

Keterangan :

kondisi baik = tingkat kerusakan < 10 %

kondisi rusak ringan = tingkat kerusakan 10 % - 20 %

kondisi rusak sedang = tingkat kerusakan 21 % - 40 %

kondisi rusak berat = tingkat kerusakan > 40 %

Tingkat kondisi sesuai dengan Permen PU No.12/PRT/M/2015

b. **Persentase pengendali daya rusak air dalam kondisi baik**

$$x = \frac{\text{Panjang pengendali daya rusak air yang dikerjakan}}{\text{panjang total pengendali daya rusak air yang kritis}} \times 100\%$$

Keterangan :

kondisi baik = tingkat kerusakan < 10 %

kondisi rusak ringan = tingkat kerusakan 10 % - 20 %

kondisi rusak sedang = tingkat kerusakan 21 % - 40 %

kondisi rusak berat = tingkat kerusakan > 40 %

c. **Persentase kapasitas penyediaan air baku**

$$x = \frac{\text{debit air baku yang dikerjakan}}{\text{Debit air baku yang seharusnya tersedia}}$$

Tabel III.9. Perbandingan Capaian Kinerja Kepala Bidang Sumber Daya Air

No.	Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2021		
		2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Infrastruktur Irigasi Dalam Kondisi Baik	15,7	26,51	43,27	49,17	53,6 %	54,03	53,95	99,87
2.	Persentase Pengendali Daya Rusak Air Dalam Kondisi Baik	45,24	72,54	90,78	98,73	105,73 %	29,02	31,58	108,81
3	Persentase Kapasitas Penyediaan Air Baku						18,11	18,11	100%
Rata-rata Capaian									154,32%

Sumber: Hasil Perhitungan dari Bidang Sumber Daya Air, 2022

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Pada bidang SDA, terdapat dua indikator yang mendukung capaian sasaran program “Meningkatnya Infrastruktur Pemanfaatan Sumber Daya Air”, yaitu:

Persentase Infrastruktur Irigasi Dalam Kondisi Baik

Indikator persentase infrastruktur irigasi dalam kondisi baik dengan target pada tahun 2022 direncanakan sebesar 54,03% dan dalam pelaksanaannya realisasinya mencapai 53,95%, dapat disimpulkan bahwa realisasi belum mencapai target dengan capaian kinerja 99,85%.

Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air

Tahun 2022 direncanakan target pelaksanaan sebesar 29,02 % dengan realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar 31,58 % atau melampaui target dengan capaian sebesar 108,81%.

Persentase Kapasitas Penyediaan Air Baku

Tahun 2022 direncanakan target pelaksanaan sebesar 18,11% dengan realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar 18,11% atau mencapai target dengan capaian sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait (Time Series)**Persentase Luas Jaringan Irigasi/ Rawa Dalam Kondisi Baik**

Pada target tahun 2022 direncanakan sebesar 0,43 % (target sampai dengan 2021 sebesar 53,60 %) dalam pelaksanaannya, realisasi mencapai 0,35 % (target sampai dengan 2021 sebesar 53,95 %), terjadi penurunan 0,10 % dari target awal. Capaian kinerja tahun 2021 sebesar 132,42 % mengalami penurunan kinerja dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 99,85 %. Hal ini disebabkan karena adanya pekerjaan yang belum dapat diselesaikan di Daerah Irigasi Rawa Tanggul Martapura Sedangkan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi/Rawa kewenangan Provinsi yang rencana dilakukan pada 7 Daerah Irigasi dan 34 Daerah Irigasi Rawa, hanya dapat dikerjakan 5 Daerah Irigasi dan 31 Daerah Irigasi Rawa. Total Rehabilitasi dan pemeliharaan saluran sepanjang 78.790,35 m. Dampak pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan yang dilakukan yaitu sebesar 23.549 Ha.

Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air

Tahun 2022 direncanakan target pelaksanaan sebesar 4,28 % (target kumulatif tahun 2022 sebesar 29,02 %) meliputi kegiatan Pembangunan Penguatan Tebing Sungai Martapura Kabupaten Banjar, Normalisasi Saluran Pengendali Banjir Guntung Damar Kota Banjarbaru sepanjang 2 Km. Pemeliharaan sungai di Kalimantan Selatan sepanjang 10,6 Km, Pemeliharaan Bangunan Pengaman Pantai sepanjang 50 m dan rehabilitasi Embung Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Persentase realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar 6,84 % (realisasi sampai dengan tahun 2022 sebesar 31,58 %). Capaian kinerja mengalami penurunan kinerja dari 176,22 % di tahun 2021 menjadi 108,81 % di tahun 2022.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Beberapa langkah strategis bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mendukung capaian sasaran strategis diatas, yaitu :

- 1) Mendukung kedaulatan pangan dengan merehabilitasi dan peningkatan serta operasi dan pemeliharaan jaringan pada 7 lokasi di Daerah Irigasi dan 34 lokasi di Daerah Irigasi Rawa dalam kondisi baik dan mendukung kedaulatan pangan dengan pengembangan Daerah Irigasi Baru (DI. Kinarum Kabupaten Tabalong seluas 1.004 ha). Untuk mendukung kegiatan ini selain dari sumber dana APBD juga diusulkan pelaksanaan kegiatannya melalui sumber dana DAK. Adapun kegiatan pendukung :
 - a. Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Kinarum 1.004 Ha Kabupaten Tabalong (Dana APBD) sepanjang 825 m
 - b. Rehabilitasi DIR Danda Besar Kab. Batola (IPDMIP) sepanjang 9.473
 - c. Rehabilitasi DI. Kahakan Kab. Hulu Sungai Tengah sepanjang 500 m
 - d. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Polder Tambak Hanyar Kab. Banjar (Dana DAK) sepanjang 31.913 m
 - e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Tanggul Martapura Kab. Banjar (dana DAK) sepanjang 18.060 m
- 2) Mengurangi dampak daya rusak air melalui kegiatan :
 - a. Rehabilitasi Embung Landasan Ulin.
 - b. Pembangunan Pengaman Pantai sepanjang 50 m.
 - c. Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Martapura Kab. Banjar (HIBAH kepada pemerintah pusat) sepanjang
 - d. Normalisasi saluran pengendali banjir Guntung Damar Kota Banjarbaru sepanjang 2 Km.
 - e. Pemeliharaan sungai Kerjasama dengan TNI sepanjang 1,6 Km.
 - f. Pemeliharaan sungai di Provinsi Kalimantan Selatan sepanjang 6 Km.
 - g. Pemeliharaan sungai kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan sepanjang 3 Km.
 - h. Operasi dan Pemeliharaan.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan Sumber Daya Air melalui kegiatan :

- a. Pengelolaan data dan informasi SDA (dengan adanya 6 buah alat hidrologi di stasiun Jorong, Asam – Asam, Jombang, Kusan, Haruyan Dayak, Gendang Timburu) dengan melakukan kegiatan monitoring dan pemeliharaan alat di WS. Cengal Batulicin. Kegiatan ini untuk mendukung pengelolaan Sumber Daya Air WS. Cengal-Batulicin.
 - b. Pos Duga air terdapat St. Jombang, St. Gendang Timburu, St. Riam Adungan Kanan (Site Office PT. ALE), St. Mangkalapi, St. Mentewe, St. Sebelimbingan, St. Sungai Pinang, St. Miawa, St. Pagar Haur, St. Beringin, St. Padang Luar.
 - c. Pos Hujan 6 tempat di Jorong, Asam – Asam, Jombang, Kusan Hulu, Haruyan Dayak, Gendang Timburu
- 4) Pengelolaan Sumber Daya Air melalui kegiatan Sidang Komisi Irigasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 yang menghasilkan Pola Tata Tanam (PTT) Kalsel dan usulan rencana revisi perda no. 3 tahun 2016 tentang Irigasi dan Rencana Tata Tanam (RTT) yang disepakati oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Balai Wilayah Sungai Kalimantan II, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah di Provinsi dan Kabupaten/kota.
- 5) Pembangunan Prasarana Air Baku 18 titik tersebar di
- a. Kab. Banjar 5 titik.
 - b. Kab. Hulu Sungai Utara 1 titik
 - c. Kab. Tanah Laut 2 titik
 - d. Kab. Tanah Bumbu 3 titik
 - e. Kab. Kotabaru 7 titik

Penurunan kinerja dari tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 untuk daerah irigasi disebabkan karena ada beberapa daerah irigasi yang tidak dikerjakan pemeliharaannya serta adanya alih komoditas dari sawah menjadi sawit.

Adapun upaya meningkatkan target capaian kinerja yaitu berkoordinasi dengan Dinas Pertanian terkait persiapan cetak sawah pada saluran irigasi baru yang sudah dikerjakan dan meningkatkan kualitas Operasi dan Pemeliharaan pada Daerah Irigasi Kewenangan yang sudah terbangun untuk meningkatkan luas areal sawah yg berfungsi.

Diharapkan di tahun berikutnya akan ada kegiatan Rasionalisasi khususnya di WS Cengal Batulicin Kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan untuk pemenuhan data jumlah kebutuhan dan letak ideal penempatan alat hidrologi sehingga didapatkan data untuk kebutuhan perencanaan, mengetahui perubahan rona lingkungan dan monitoring sungai.

Melakukan perhitungan neraca air di beberapa DAS untuk Tahun 2023 untuk menunjang data kebutuhan perijinan pemanfaatan air permukaan di WS Kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan⁴. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian sasaran program Bidang Sumber Daya Air yang dimiliki oleh Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan yaitu “*Meningkatnya Infrastruktur Pemanfaatan Sumber Daya Air*” tidak lepas dari dukungan program dan kegiatan yang terlaksana pada tahun 2022 yaitu **Program Pengelolaan Sumber Daya Air**.

Capaian kinerja Kepala Bidang Sumber Daya Air tak luput dari dukungan seksi-seksi yang ada di bidang SDA, yaitu:

1. Seksi Pembinaan Teknis Sungai, Pantai, dan Irigasi

Tabel III.9. Capaian Kinerja Seksi Pembinaan Teknis Sungai, Pantai, dan Irigasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	
				Realisasi	%
Seksi Pembinaan Teknis Sungai, Pantai, dan Irigasi					
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan SDA yang Ditindaklanjuti	5 dok	5	100

Sumber: Hasil Perhitungan dari Bidang Sumber Daya Air, 2022

Rumus Perhitungan:

- a. Jumlah dokumen perencanaan dan pengelolaan SDA yang ditindaklanjuti = Jumlah dokumen perencanaan dan pengelolaan SDA yang dikerjakan pada tahun berjalan.

Tabel III.10. Perbandingan Capaian Kinerja Seksi Pembinaan Teknis Sungai, Pantai, dan Irigasi

No.	Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2022		
		2017	2018	2019	2020	2021	Target	Real	Capaian
1	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan SDA yang Ditindaklanjuti	10	9	6	12	5	5	5	100 %

Sumber: Hasil Perhitungan dari Bidang Sumber Daya Air, 2022

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Seksi Pembinaan Teknis Sungai, Pantai, dan Irigasi dengan indikator Jumlah dokumen perencanaan dan pengelolaan Sumber Daya Air pada tahun 2022 telah terealisasi 5 dokumen dari target 5 dokumen atau dengan capaian kinerja sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait (Time Series)

Pada tahun 2021 dari target 5 dokumen dapat direalisasikan sebanyak 5 dokumen perencanaan dan pengelolaan sumber daya air dengan capaian kinerja 100 %. Capaian kinerja stabil sebesar 100% dibandingkan tahun 2021. Rencana Renstra sampai dengan tahun 2026 sebanyak 39 dokumen perencanaan sehingga capaian kinerja apabila dihitung dari target akhir renstra realisasi sebanyak 5 dokumen saat ini hanya sebesar 13 %.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pencapaian kinerja Seksi Pembinaan Teknis Sungai, Pantai dan Irigasi dengan indikator jumlah dokumen perencanaan dan pengelolaan Sumber Daya Air pada tahun 2022 sama dengan tahun 2021 yaitu seluruh dokumen dapat dipenuhi sesuai dengan targetnya, data dokumen perencanaan dan pengelolaan SDA antara lain:

- DED Peningkatan Embung Cempaka Kota Banjarbaru
- DED Pembangunan Pengaman Pantai Kabupaten Tanah Bumbu

- Studi LARAP Rencana Pembangunan Pengendali Banjir DAS Satui Kabupaten Tanah Bumbu
- SID Rehabilitasi dan Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Pelaksanaan Survey E-PAKSI (biaya Penunjang DAK)

4. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian kinerja pada Seksi Pembinaan Teknis Sungai, Pantai dan Irigasi tidak lepas dari dukungan program dan kegiatan yang terlaksana pada tahun 2021 yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan kegiatan Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

2. Seksi Irigasi dan Air Baku

Tabel III.11. Capaian Kinerja Seksi Irigasi dan Air Baku

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	
				Realisasi	%
Seksi Irigasi dan Air Baku					
1	Terlaksananya Pembangunan Daerah Irigasi/Rawa	Panjang jaringan irigasi/rawa yang baru dibangun yang berkualitas	2.000 m	830 m	41,50
2	Terlaksananya Pengelolaan Daerah Irigasi/Rawa Kewenangan (Rehabilitasi dan OP)	Jumlah daerah irigasi/rawa kewenangan yang direhabilitasi dan dipelihara yang berfungsi	34 DIR / 7 DI	31 DIR / 5 DI	81,30
3	Terlaksananya Penyediaan Prasarana Air Baku	Jumlah prasarana air baku yang dibangun yang berkualitas	18 buah	18 buah	100

Sumber: Hasil Perhitungan dari Bidang Sumber Daya Air, 2022

Rumus Perhitungan:

a. Panjang jaringan irigasi/rawa yang baru dibangun yang berkualitas =

$x = \text{Panjang dan jumlah bangunan pada jaringan irigasi baru yang dibangun pada tahun berjalan}$

b. Jumlah daerah irigasi/rawa kewenangan yang direhabilitasi dan dipelihara yang berfungsi = Jumlah daerah irigasi/rawa yang di rehabilitasi dan dipelihara pada tahun berjalan.

c. Jumlah prasarana air baku yang dibangun yang berkualitas = kapasitas intake air baku yang dibangun pada tahun berjalan

Tabel III.12. Perbandingan Capaian Kinerja Seksi Irigasi dan Air Baku

No.	Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2021		
		2017	2018	2019	2020	2021	Target	Real	Capaian
1	Panjang jaringan irigasi/rawa yang baru dibangun yang berkualitas	200 m	500 m	404 m	-	4.000 m	2.000 m	830 m	41,50
2	Jumlah daerah irigasi/rawa kewenangan yang direhabilitasi dan dipelihara yang berfungsi	29 DIR / 7 DI	16 DIR / 4 DI	34 DIR / 7 DI	34 DIR / 7 DI	34 DIR / 5 DI	34 DIR / 7 DI	31 DIR 5 DI	81,30
3	Jumlah prasarana air baku yang dibangun yang berkualitas	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	18 buah	18 buah	100

Sumber: Hasil Perhitungan dari Bidang Sumber Daya Air, 2022

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Panjang jaringan irigasi/rawa yang baru dibangun yang berkualitas

Rencana target tahun 2022 sebesar pembangunan jaringan irigasi baru sebesar 2.000 m namun realisasi tahun ini hanya sebesar 830 m sehingga capaian yang didapat 41,50 %. Adapun rincian pekerjaan meliputi :

- Pembangunan Jaringan Irigasi Kinarum Kabupaten Tabalong ; panjang rencana 2.000 m ; panjang realisasi 830 m
- Supervisi Pembangunan Jaringan Irigasi Kinarum Kabupaten Tabalong

Jumlah daerah irigasi/rawa kewenangan yang direhabilitasi dan dipelihara yang berfungsi

Pada Jumlah daerah irigasi/rawa yang direhabilitasi dan dipelihara rencana 34 DIR/7 DI dapat direalisasikan sebesar 31 DIR/5 DI sehingga dapatkan capaian sebesar 81,30 %. Adapun kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :

- Rehabilitasi DI. Kahakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ; rencana 500 m ; realisasi 500 m
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Danda Besar Kabupaten Barito Kuala (IPDMIP) ; rencana 24.550 m ; realisasi 9.743 m
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Sei Muhur Kabupaten Barito Kuala (IPDMIP) ; rencana 18.650 m ; realisasi 15.000 m

- Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Kabupaten Banjar ; rencana 1.800 m ; realisasi 2.000 m
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Kabupaten Barito Kuala ; Rehab Kantor Pengamat DIR. Sei Muhur
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Kabupaten Hulu Sungai Utara ; 400 m ; realisasi 350 m
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Polder Tambak Hanyar Kabupaten Banjar (DAK) ; rencana 23.650 m ; realisasi 31.913 m
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Tanggul Martapura Kabupaten Banjar (DAK) ; rencana 26.519,077 m ; realisasi 18.060 m
- Supervisi Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Danda Besar Kabupaten Barito Kuala (IPDMIP)
- Supervisi Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Sei Muhur Kabupaten Barito Kuala (IPDMIP)
- Supervisi Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Polder Tambak Hanyar Kabupaten Banjar (Biaya Penunjang DAK)
- Supervisi Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Tanggul Martapura Kabupaten Banjar (Biaya Penunjang DAK)
- Pemeliharaan Berkala Daerah Irigasi Permukaan Kab. Tabalong, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Tapin ; rencana 1.994 m ; realisasi 1.994 m

Kapasitas intake & jaringan air baku yang dikelola

Jumlah prasarana air baku yang dibangun yang berkualitas tahun dapat terealisasi sesuai target sebanyak 18 buah sehingga capaian kinerja yang didapat sebesar 100 %. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi :

- Pembangunan Sumur Bor/ Air Tanah Kabupaten Banjar ; rencana 5 buah ; realisasi 5 buah ;
- Pembangunan Sumur Bor/ Air Tanah Kabupaten Hulu Sungai Utara ; rencana 1 buah ; realisasi 1 buah
- Pembangunan Sumur Bor/ Air Tanah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru ; rencana 10 buah ; realisasi 10 buah ;
- Pembangunan Sumur Bor/ Air Tanah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Tanah Laut ; rencana 2 buah ; realisasi 2 buah ;

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait (Time Series)

Panjang jaringan irigasi/rawa yang baru dibangun yang berkualitas

Pada tahun 2022 tidak ada pekerjaan pembangunan sehingga tidak dapat dibandingkan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya.

Jumlah daerah irigasi/rawa kewenangan yang direhabilitasi dan dipelihara yang berfungsi

Hal ini menunjukkan kinerja mengalami penurunan dari tahun 2022 mampu terealisasi sesuai target yaitu 100 %.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Panjang Jaringan Irigasi/Rawa yang Baru Dibangun yang Berkualitas

Target Panjang jaringan irigasi yang dibangun tidak terpenuhi dikarenakan rencana awal saluran berupa saluran tanah, implementasinya saluran bervariasi antara saluran tanah, saluran pasangan batu dan gorong gorong beton.

Jumlah daerah irigasi/rawa kewenangan yang direhabilitasi dan dipelihara yang berfungsi

Penyebab tidak terpenuhinya target untuk jumlah daerah irigasi/rawa kewenangan yang direhabilitasi dan dipelihara tidak sesuai target yaitu ada beberapa lokasi yang tidak dapat dikerjakan karena lokasi terendam banjir (air masih tinggi) seperti di DIR. Matang Hanau serta adanya aspek non teknis (masyarakat) dan harus berkoordinasi dengan kabupaten di sekitarnya. Untuk DI. Binuang dan DI. Belanti areal lahan sawah semakin berkurang dan dalam proses alih status dari Kewenangan Provinsi menjadi Kewenangan Kabupaten.

4. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian kinerja pada Seksi Irigasi dan Air Baku tidak lepas dari dukungan program dan kegiatan yang terlaksana pada tahun 2020 yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

c. Seksi Drainase, Sungai, dan Pantai

Tabel III.13. Capaian Kinerja Seksi Drainase, Sungai, dan Pantai

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	
				Realisasi	%
Seksi Drainase, Sungai, dan Pantai					
1	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sungai Pantai dan Drainase	Panjang dan jumlah bangunan pengendali banjir dan pengaman pantai yang dibangun yang berkualitas	100 m	50 m	50 %
2	Terlaksananya Pengelolaan Sungai, Pantai dan Drainase	Panjang bangunan pengendali banjir dan pengaman pantai yang direhabilitasi dan dipelihara yang berfungsi	4,1 Km	6,55 Km	159,76 %
3	Terlaksananya Pengelolaan Tampungan Air Embung, Situ, Waduk	Jumlah tampungan air embung, situ, waduk yang dikelola yang berfungsi	1 buah	1 buah	100 %

Sumber: Hasil Perhitungan dari Bidang Sumber Daya Air, 2022

Rumus Perhitungan:

a. Panjang dan Jumlah bangunan pengendali banjir dan pengaman pantai yang dibangun dan direhabilitasi = Panjang dan jumlah bangunan pengendali banjir dan pengaman pantai yang dibangun dan direhabilitasi pada tahun berjalan

Tabel III.14. Capaian Kinerja Bidang Sumber Daya Air

No.	Indikator Kinerja	Realisasi					Target	Tahun 2022	
		2017	2018	2019	2020	2021		Realisasi	Capaian
1	Panjang dan jumlah bangunan pengendali banjir dan pengaman pantai yang dibangun yang berkualitas						100 m	50 m	50 %
2	Panjang bangunan pengendali banjir dan pengaman pantai yang direhabilitasi dan dipelihara yang berfungsi	6,4 km	11,7 km	25,4 km	12,5 km	17 km	4,1 Km	6,55 Km	159,76 %

3	Jumlah tampungan air embung, situ, waduk yang dikelola yang berfungsi	1 buah	1 buah	100 %
---	---	--------	--------	-------

Sumber: Hasil Perhitungan dari Bidang Sumber Daya Air, 2021

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Panjang dan jumlah bangunan pengendali banjir dan pengaman pantai yang dibangun yang berkualitas

Target Rencana sepanjang 100 m realisasi sepanjang 50 m sehingga didapatkan capaian kinerja sebesar 50 %.

Panjang bangunan pengendali banjir dan pengaman pantai yang direhabilitasi dan dipelihara yang berfungsi

Target Rencana sepanjang 4,1 Km realisasi sepanjang 6,55 Km sehingga didapatkan capaian kinerja sebesar 159,76 %.

Jumlah tampungan air embung, situ, waduk yang dikelola yang berfungsi

Target Rencana 1 buah realisasi 1 buah sehingga didapatkan capaian kinerja sebesar 100,00 %.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait (Time Series)

Kinerja indikator Panjang dan jumlah bangunan pengendali banjir dan pengaman pantai yang dibangun dan direhabilitasi pada tahun 2021 dan 2020 telah melampaui target.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Dari Tabel Perbandingan tahun 2022 dengan tahun 2021 dapat dilihat peningkatan capaian kinerja di indikator kinerja panjang bangunan pengendali banjir dan pengaman pantai yang direhabilitasi dan dipelihara yang berfungsi dari 115 % menjadi 159 %.

4. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian kinerja pada Seksi Irigasi dan Air Baku tidak lepas dari dukungan program dan kegiatan yang terlaksana pada tahun 2021 yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

3. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan kajian teknis dan desain, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan. Bidang Bina Marga mempunyai 1(satu) sasaran program yaitu “Meningkatnya infrastruktur jalan Provinsi” dengan capaian kinerja sebagai berikut

Tabel III.15 Capaian Kinerja Kepala Bidang Bina Marga

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
SP.3	Meningkatnya Infrastruktur Jalan provinsi	1. Tingkat Kemantapan Jalan	80%	81,63%	102%
		2. Tingkat Aksesibilitas Jalan	35,75%	35,75%	100%
Rata-Rata Capaian					101%

Sumber: Hasil Perhitungan dari Bidang Bina Marga, 2022

Rumus Perhitungan:

a. Tingkat Kemantapan Jalan

$$x = \frac{\text{Panjang Jalan mantap}}{\text{jumlah seluruh panjang jalan kewenangan provinsi}} \times 100\%$$

b. Tingkat Aksesibilitas Jalan

$$x = \frac{\text{jumlah titik wilayah yang tekoneksi jalan}}{\text{jumlah titik/ wilayah yang ada (yang seharusnya terkoneksi)}} \times 100\%$$

Tabel III.16. Perbandingan Capaian Kinerja Kepala Bidang Bina Marga

No.	Indikator Kinerja	Realisasi					Target	Tahun 2022	
		2017	2018	2019	2020	2021		Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Kemantapan Jalan	71,71	77,57	79,07	79,92%	80,50%	80%	81,63%	102%
2.	Tingkat Aksesibilitas Jalan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	35,75%	35,75%	100%
Rata-rata Capaian								101%	

Sumber: Hasil Perhitungan dari Bidang Bina Marga, 20212

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Tingkat Kemantapan Jalan

Target indikator tingkat kemantapan jalan pada tahun 2022 adalah sebesar 80% dengan realisasi sebesar 81,63%, dalam kata lain dapat disimpulkan bahwa

capaian kinerja sebesar 102% sudah melampaui target dengan kategori sangat memuaskan.

Tingkat Aksesibilitas Jalan

Tahun 2022 direncanakan target indikator tingkat aksesibilitas jalan sebesar 35,75%, dalam pelaksanaannya realisasinya sebesar 35,75% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait (Time Series)

Tingkat Kemantapan Jalan

Target indikator tingkat kemantapan jalan pada tahun 2022 adalah sebesar 80% dengan realisasi sebesar 81,63%, dalam kata lain dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sebesar 102% sudah melampaui target dengan kategori sangat memuaskan.

Tingkat Aksesibilitas Jalan

Tahun 2022 direncanakan target indikator tingkat aksesibilitas jalan sebesar 35,75%, dalam pelaksanaannya realisasinya sebesar 35,75% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Bidang Bina Marga selaku unsur lini bagian dari perangkat dinas bertugas membangun dan memelihara (rehabilitasi) jaringan jalan dan jembatan, yang memberikan dampak baik dengan bertambahnya panjang jalan sebagai aset negara/daerah, serta dipertahankannya kondisi jalan yang ada melalui tahapan, secara langsung dirasakan masyarakat dengan nyaman, lancar dan aman selaku pengguna jalan.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor Pada tahun 2018, berdasarkan surat keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/030/KUM/ SK jalan provinsi 756,12 km dan jalan strategis provinsi 780.84 km .

Bidang Bina Marga yang bertanggung jawab atas sasaran strategis “Meningkatnya Infrastruktur Jalan Provinsi”, sasaran ini diukur menggunakan indikator tingkat kemantapan jalan (%) dan tingkat aksesibilitas jalan (%).

Pada tahun 2022, pelaksanaan program penyelenggaraan jalan sepanjang 52.29 km. Panjang jalan yang dibangun 25,98 km, jembatan yang di bangun 6 buah, Panjang jalan yang ditingkatkan 1,78 km, Panjang jalan yang di rekonstruksi atau rehabilitasi 24,53 km, Panjang jalan yang dipelihara 3,55 km dan jembatan yang dipelihara 143 meter.

Persentase jalan dalam kondisi mantap dan tingkat konektivitas dalam kondisi mantap telah mencapai target dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini akan dipertahankan untuk mencapai target ruas jalan mantap ditahun 2023 sesuai target dari Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Upaya atau rencana aksi yang dilakukan di tahun mendatang untuk mencapai target selanjutnya adalah dengan membuat skala prioritas program/kegiatan dan tentu dengan adanya dukungan pendanaan baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.

4. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian sasaran program Bidang Bina Marga yang dimiliki oleh Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan yaitu “Meningkatnya Infrastruktur Jalan Provinsi” tidak lepas dari dukungan program dan kegiatan yang terlaksana pada tahun 2022 yaitu Program Penyelenggaraan Jalan.

Capaian kinerja Kepala Bidang Bina Marga tak luput dari dukungan seksi-seksi yang ada di bidang Bina Marga.

1. Seksi Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan

Tabel III.17. Capaian Kinerja Bidang Bina Marga

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	
				Realisasi	%
Seksi Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan					
1	Tersedianya Perencanaan dan Pengendalian Program Kebina Margaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Bidang Bina Marga yang ditindaklanjuti	16 dok	16 dok	100 %

Sumber: Hasil Perhitungan dari Bidang Bina Marga, 2021

Rumus Perhitungan:

- a. Jumlah dokumen perencanaan, pengawasan dan pelaporan bidang Bina Marga = Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengawasan dan Pelaporan BM yang dikerjakan pada tahun berjalan.

Tabel III.18. Capaian Kinerja Bidang Bina Marga

No.	Indikator Kinerja	Realisasi						
		2017	2018	2019	2020	Target	Real	Capaian
1	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Bidang Bina Marga yang ditindaklanjuti	7	1	11	15	16 dok	16 dok	100 %

Sumber: Hasil Perhitungan dari Bidang Bina Marga, 2021

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Pada indikator Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Bidang Bina Marga yang ditindaklanjuti terealisasi 16 dokumen dari target 16 dokumen dengan capaian 100%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait (Time Series)

Kinerja indikator Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Bidang Bina Marga yang ditindaklanjuti selalu stabil dari tahun ke tahun dengan capaian 100%.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Kinerja Seksi Pembinaan Teknis Jalan dan jembatan menunjukkan adanya kestabilan kinerja jika dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% yang tercapai dengan didukung oleh

- Review FS dan DLH Jembatan Barito 2
- Survey Kondisi Jalan
- Survey RMS
- Review DED jalan dan jembatan sungai lulut - kompleks rahayu
- DED Akses Ruas Jalan Kawasan Olahraga Terintegrasi
- DED Perbaikan Geometrik Jalan dan Jembatan Awang Bangkal - Kahelaan
- DED Perbaikan Geometrik Jalan dan Jembatan Kahelaan - Kodeco 58

- DED Pile Slab Amuntai
- DED Longsor Jalan Banjarmasin Martapura
- Survey Kondisi Jembatan
- DED Jembatan Sei Balangan (Lampihong - Paringin)
- Review DED Jembatan Kampung Bali
- Review DED Jembatan Barambai
- DED Jembatan Jalan Alternatif Menuju Makam Syeh Arsyad Al Banjari
- DED Jembatan Simpang 3 Jarak

4. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian Kinerja pada Seksi Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan tidak lepas dari dukungan program dan kegiatan yang terlaksana 2022 yaitu Program Penyelenggaraan Jalan dengan kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

2. Seksi Jalan

Tabel III.19. Capaian Kinerja Bidang Bina Marga

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	
				Realisasi	%
Seksi Jalan					
1	Terlaksananya Pembangunan Jalan sesuai dengan standar bina marga	Panjang Jalan yang di bangun yang berkualitas	47,13 km	52,29 km	110,95%

Sumber: Hasil Perhitungan dari Bidang Bina Marga, 2022

Rumus Perhitungan:

- a. Panjang Jalan yang akan di bangun tahun berjalan = Paket Pekerjaan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan yang memenuhi kriteria

Tabel III.20. Capaian Kinerja Bidang Bina Marga

No.	Indikator Kinerja	Realisasi				2021		
		2018	2019	2020	2021	Target	Real	Capaian
1	Panjang Jalan yang di bangun yang berkualitas	36 km	57,95 km	32,48 km	26,89 km	47,13 km	52,29 km	110,95%

Sumber: Hasil Perhitungan dari Bidang Bina Marga, 2021

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Pada indikator Panjang Jalan yang di bangun yang berkualitas terealisasi 52,29 km dari target 47,13 km dengan capaian kinerja sebesar 110,95%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait (Time Series)

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Kinerja Seksi Jalan pada tahun 2022 dapat mencapai target di tahun 2022 dengan realisasi 52,29 km walaupun ada beberapa paket yang mengalami keterlambatan pekerjaan

4. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian kinerja pada Seksi Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan tidak lepas dari dukungan program dan kegiatan yang terlaksana pada tahun 2021 yaitu Program Penyelenggaraan Jalan dengan kegiatan Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Berkala Jalan, Pemeliharaan Rutin Jalan.

1. Seksi Jembatan

Tabel III.21. Capaian Kinerja Bidang Bina Marga

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	
				Realisasi	%
Seksi Jembatan					
1	Terlaksananya Pembangunan Jembatan sesuai dengan standar bina marga	Jembatan yang di bangun dan direhabilitasi yang berkualitas	6 buah jembatan	6 buah jembatan	100%

Sumber: Hasil Perhitungan dari Bidang Bina Marga, 2021

Rumus Perhitungan:

- a. Pembangunan Jembatan yang akan di bangun pada tahun berjalan = Jumlah Ruas jembatan yang telah memenuhi kriteria

Tabel III.22. Capaian Kinerja Bidang Bina Marga

No.	Indikator Kinerja	Realisasi				2022		
		2018	2019	2020	2021	Target	Real	Capaian
1	Jembatan yang di bangun dan direhabilitasi yang berkualitas	-	-	4	6	6 buah	6 buah	100%

Sumber: Hasil Perhitungan dari Bidang Bina Marga, 2022

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Pada indikator Jembatan yang di bangun dan direhabilitasi yang berkualitas tercapai 6 buah jembatan dari target 6 buah jembatan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait (Time Series)

Kinerja indikator Jembatan yang di bangun dan direhabilitasi yang berkualitas pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2021.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Kinerja Seksi Jembatan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya mengenai jumlah jembatan dan ada paket pekerjaan yang mengalami keterlambatan kerja sehingga dikenakan denda 50 hari

No	Nama Kegiatan	Buah Jembatan
1.	Pembangunan Jembatan Aranaway	1 buah jembatan
2.	Pembangunan Jembatan Banjang - Pulau Nyiur - Batumandi	1 buah jembatan
3.	Pembangunan jembatan Batulicin - Mentewe	1 buah jembatan
4.	Pembangunan jembatan Lumpangi - Loksado	1 buah jembatan
5.	Pembangunan Jembatan Simpang 3 Jarak Simpang belangian	1 buah jembatan
6.	Pembangunan Jembatan Mandiangin	1 buah jembatan



4. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian kinerja pada Seksi Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan tidak lepas dari dukungan program dan kegiatan yang terlaksana pada tahun 2021 yaitu Program Penyelenggaraan Jalan dengan kegiatan Pembangunan Jembatan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan.

4. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana keciptakaryaannya. Bidang Cipta Karya mempunyai 1(satu) sasaran program yaitu “Meningkatnya Infrastruktur Dasar Keciptakaryaannya yang dapat diakses oleh Masyarakat” dengan capaian kinerja sebagai berikut

Tabel III.23. Capaian Kinerja Kepala Bidang Cipta Karya

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
SP.3	Meningkatnya Infrastruktur Dasar Keciptakaryaannya yang dapat diakses oleh Masyarakat	1. Cakupan Pelayanan Air Minum yang Layak	88,68%	88,68%	100%
		2. Cakupan pelayanan air limbah yang layak	90%	88,28%	98,08%
		3. Persentase sarana dan prasarana Bangunan Gedung dalam kondisi baik	100%	100%	100%
		4. Persentase sarana dan prasarana Bangunan dan Lingkungannya dalam kondisi baik	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian					99,52%

Sumber: Hasil Perhitungan dari Bidang Cipta Karya, 2022

Rumus Perhitungan:

a. Cakupan Pelayanan Air Minum yang Layak

$$x = \frac{\text{Jumlah populasi dengan akses terhadap sumber air minum layak}}{\text{Jumlah populasi seluruhnya}} \times 100\%$$

b. Cakupan pelayanan air limbah yang layak

$$x = \frac{\text{jumlah populasi yang memiliki akses terhadap pelayanan air limbah domestik layak/aman pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah populasi seluruhnya}} \times 100\%$$

c. Persentase sarana dan prasarana Bangunan Gedung dalam kondisi baik

$$x = \frac{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah total rencana sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran pada periode yang sama}} \times 100\%$$

d. Persentase sarana dan prasarana Bangunan Gedung dalam kondisi baik

$$x = \frac{\text{Jumlah Sarana dan prasarana bangunan dan lingkungan dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah total rencana sarana dan prasarana bangun dan lingkungan pada periode yang sama}} \times 100\%$$

Tabel III.24. Perbandingan Capaian Kinerja Kepala Bidang Cipta Karya

No.	Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2022		
		2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	Capaian
1.	Cakupan Pelayanan Air Minum yang Layak	72,99	78,77	78,98	77,36	83,02	88,68%	88,68%	100%
2.	Cakupan pelayanan air limbah yang layak	52,70	68,62	68,22	84,45	86,85	90%	88,28%	98,09%
3.	Persentase sarana dan prasarana Bangunan Gedung dalam kondisi baik	N/A	N/A	N/A	N/A	112,5	100%	100%	100%
4.	Persentase sarana dan prasarana Bangunan dan Lingkungannya dalam kondisi baik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian									99,52%

Sumber: Hasil Perhitungan dari Bidang Cipta Karya, 2022

1. Perbandingan Realisasi dengan Target**Cakupan Pelayanan Air Minum yang Layak**

Target indikator cakupan pelayanan air minum yang layak pada tahun 2022 terealisasi sebesar 88,68% dari target 88,68%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

Cakupan Pelayanan Air Limbah yang Layak

Pada tahun 2022 realisasi indikator cakupan pelayanan air limbah yang layak terealisasi sebesar 88,28% dari target 90,00% atau besar capaian kinerja sebesar 98,09%.

Persentase sarana dan prasarana bangunan Gedung dalam kondisi baik

Pada tahun 2022 realisasi indikator persentase sarana dan prasarana bangunan Gedung dalam kondisi baik sebesar 100% dari target 100% atau capaian kinerja sebesar 100%.

Persentase sarana dan prasarana bangunan dan lingkungannya dalam kondisi baik

Pada tahun 2022 realisasi indikator persentase sarana dan prasarana bangunan dan lingkungannya dalam kondisi baik sebesar 100% dari target 100% atau capaian kinerja sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait (Time Series)

Cakupan Pelayanan Air Minum

Indikator ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 5,66% tetapi belum memenuhi target dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19.

Cakupan Pelayanan Air Limbah

Indikator ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan kinerja sebesar 2,40%.

Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur dalam kondisi baik

Indikator ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan kinerja sebesar 21,67%.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Bidang Cipta Karya bertanggung jawab atas sasaran program *“Meningkatnya Infrastruktur dasar Keciptakaryaan yang dapat diakses oleh masyarakat”*. Sasaran ini diukur menggunakan indikator cakupan pelayanan air minum yang layak, cakupan pelayanan air limbah yang layak, persentase sarana dan prasarana bangunan Gedung dalam kondisi baik, dan persentase sarana dan prasarana bangunan dan lingkungannya dalam kondisi baik.

Pada tahun 2022, target indikator cakupan pelayanan air minum tercapai 100% dikarenakan Dinas PUPR Provinsi aktif dalam melakukan pembinaan dan pendampingan upaya peningkatan akses penyediaan air minum kepada 13 Kabupaten/Kota terutama dalam perhitungan akses layak bukan jaringan perpipaan. Sedangkan cakupan pelayanan air limbah juga turut mengalami kenaikan dikarenakan edukasi dan pembinaan yang dilakukan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan terus dilaksanakan kepada seluruh stakeholders baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Operator Pengelola air limbah domestik guna meningkatkan pemahaman tentang Sanitasi serta Peningkatan kapasitas aparatur sipil negara IPLT dalam pengelolaan dan pemrograman sektor sanitasi.

Capaian kinerja dan juga realisasi target Indikator kinerja sarana dan prasarana bangunan dan lingkungannya dalam kondisi baik di tahun 2022 telah terpenuhi 100% atau artinya realisasi sesuai dengan apa yang direncanakan/ditargetkan. Hal ini tidak lepas dari optimalnya tahapan persiapan yang telah dilakukan oleh Bidang Cipta Karya dengan aktif berkoordinasi dengan seluruh stakeholders terkait.

4. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian sasaran program Bidang Cipta Karya yang dimiliki oleh Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan yaitu *“Meningkatnya Infrastruktur Dasar Keciptakarya yang dapat diakses oleh Masyarakat”* tidak lepas dari dukungan program dan kegiatan yang terlaksana pada tahun 2022 yaitu Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Penataan Bangunan Gedung, dan Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya.

Kepala Bidang Cipta Karya didukung oleh kepala seksi yang ada di Bidang Cipta Karya dengan indikator:

1. Seksi Pembinaan Teknis Penyehatan Lingkungan, Air Minum dan Bangunan

Tabel III.25. Capaian Kinerja Seksi Pembinaan Teknis Penyehatan Lingkungan, Air Minum dan Bangunan Bidang Cipta Karya

No.	Sasaran Kegiatan	Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	Terlaksananya pembinaan teknis keciptakarya	Jumlah kab/kota yang terbina terkait keciptakarya	13 kab/kota	13 kab/kota	100%
2	Penyusunan dokumen perencanaan cipta karya	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Keciaptakarya yang ditindaklanjuti	25 Dok	25 dok	100%

Sumber: Hasil Perhitungan dari Bidang Cipta Karya, 2022

Rumus Perhitungan:

a. Jumlah kab/kota yang terbina terkait keciptakarya

$x = \text{Jumlah SDM yang terbina pada tahun berjalan}$

b. Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Keciaptakarya yang ditindaklanjuti

$x = \text{Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang dikerjakan pada tahun berjalan}$

Tabel III.26. Perbandingan Capaian Kinerja Bidang Cipta Karya

No.	Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2022		
		2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah kab/kota yang terbina terkait keciptakarya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13 kab/kota	13 kab/kota	100%
2.	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Keciaptakarya yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25 Dok	25 dok	100%

Sumber: Hasil Perhitungan dari Bidang Cipta Karya, 2022

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Jumlah kab/kota yang terbina terkait keciptakarya

Pada indikator Jumlah kab/kota yang terbina terkait keciptakarya terealisasi 13 kab/kota dari target 13 kab/kota dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Keciaptakarya yang ditindaklanjuti

Pada tahun 2022 realisasi indikator Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Keciaptakarya yang ditindaklanjuti terealisasi 25 dokumen dari target 25 dokumen atau besar capaian kinerja sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait (Time Series)

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Kinerja Seksi Pembinaan Teknis Penyehatan Lingkungan, Permukiman, Air Minum dan Bangunan pada tahun 2022 telah mencapai target dan urgensi penyusunan dokumen perencanaan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan di tahun 2022 berdasarkan hasil koordinasi dengan stakeholders terkait, berikut dokumen-dokumen yang perencanaan dan pelaporan keciptakarya yang ditindaklanjuti antara lain:

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		
1	DED TPST Regional	Banjarkabula
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR MINUM		
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan		
2	Perencanaan Lanjutan Pembangunan Perpipaan Perdesaan Kecamatan Karang Intan	Kabupaten Banjar
3	Perencanaan Pengembangan SPAM Regional Banjarkabula JDU Jalan Trikora, Kota Banjarbaru	Kota Banjarbaru
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		
4	Perencanaan Pembangunan Kantor BIN	Kota Banjarbaru
5	Perencanaan Gapura Pagar Masjid Al Mukaromah	Kabupaten Banjar
6	Perencanaan Site Development Masjid Perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan	Kawasan Perkantoran
7	DED Interior Ruang Kedatangan Bandara Syamsudinnoor	Kota Banjarbaru
8	Perencanaan Pekerjaan Interior Pusat Informasi Geopark Meratus	Kabupaten Banjar
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		
9	Perencanaan Rehabilitasi Berat Gedung UPTD Lab.Bahan Konstruksi	Kota Banjarmasin
10	Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Samsat Amuntai	Kabupaten Hulu Sungai Utara
11	Review Desain Rehabilitasi Anjungan Kalsel TMII	Jakarta
12	Review Desain Renovasi Stadion 17 Mei di Banjarmasin Tahap I (tribun inggris)	Kota Banjarmasin
13	Perencanaan Rehabilitasi VIP Room Bandara	Banjarkabula
14	Perencanaan Rehabilitasi Sarana Prasarana Masjid Sabilal Muhtadin (Kolam)	Kota Banjarmasin
15	Perencanaan Rehabilitasi Sarana Prasarana Masjid Sabilal Muhtadin (Pengecatan)	Kota Banjarmasin
16	Perencanaan Rehabilitasi Masjid Bajuin	Kabupaten Tanah Laut
17	Perencanaan Rehabilitasi Sarpras Stasiun Demang Lehman	Kabupaten Banjar
18	Perencanaan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pagar Pagar TMII	DKI Jakarta

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN		
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah		
19	Perencanaan Perkerasan Jalan Lingkungan Area Parkir Mahligai Pancasila	Kota Banjarmasin
Penataan Bangunan dan Lingkungan		
20	Perencanaan Pembangunan Jalan Pangkalan Pendaratan Ikan Saijan Kotabaru	Kabupaten Kotabaru
21	Perencanaan Perkuatan/Perkerasan Halaman Rumah Jabatan Wakil Gubernur	Kota Banjarmasin
22	Perencanaan Pengaspalan Subdenpom	Kota Banjarbaru
23	Perencanaan Trapo Balidangda	Kota Banjarbaru
24	Perencanaan Pengaspalan Polda Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru
25	Perencanaan Pengaspalan Komplek Rindam	Kota Banjarmasin

Sumber: Olah Data Bidang Cipta Karya, 2022

Sedangkan kegiatan pembinaan di kab/kota juga terlaksana yang mendukung peningkatan kinerja Pembinaan Teknis Penyehatan Lingkungan, Permukiman, Air Minum dan Bangunan pada tahun 2022 , antara lain:

NO	KEGIATAN BIMTEK/SOSIALISASI BIDANG CIPTA KARYA 2022
1	Pembinaan Teknis/Sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
2	Sosialisasi Penerapan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Lingkup Bangunan Gedung
3	Forum Grup Diskusi Penanganan Bangunan Bertingkat Dilahan Rawa di Kalimantan Selatan
4	Bimbingan teknis pekerjaan konstruksi pemancangan
5	Sosialisasi Pembangunan dan Peningkatan Tangki Septik di Bantaran Sungai Dalam Rangka Pengamanan Air Minum Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Selatan
6	Sosialisasi Pelestarian Bangunan Cagar Budaya di Kalimantan Selatan
7	Bimbingan Teknis Strategis Sanitasi KAbupaten Kota se Provinsi Kalimantan Selatan
8	Bimbingan Teknis Rencana Aksi Daerah Air Minum Provinsi Kalimantan Selatan
9	Coaching Clinic Provinsi Kalimantan Selatan
10	Kick Off Meeting Tahunan Kelompok Kerja Perumahan Air minum dan Sanitasi (PPAS)
11	Lokakarya Pokja AMPL Provinsi Kalimantan Selatan

12	Sosialisasi Air Limbah Provinsi Kalimantan Selatan
13	Pengadaan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Jakstrada Air Limbah Provinsi Kalimantan Selatan
14	Pengadaan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Jakstrada Air Minum Provinsi Kalimantan Selatan
15	Sosialisasi Sanitasi Provinsi Kalimantan Selatan
16	Workshop Sanimas Provinsi Kalimantan Selatan

4. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian kinerja pada Pembinaan Teknis Penyehatan Lingkungan, Air Minum dan Bangunan Jalan pada tahun 2021 tidak lepas dari dukungan program dan kegiatan yang terlaksana pada tahun 2021 yaitu Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Penataan Bangunan Gedung, dan Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya dengan kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi, Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik, Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi.

2. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan

Tabel III.27. Capaian Kinerja Bidang Cipta Karya

No.	Sasaran Kegiatan	Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Seksi Penataan Bangunan					
1	Terlaksananya Pembinaan Teknis Keciptakarya	Jumlah SDM yang terbina terkait keciptakarya	50 orang	50 orang	100
2	Tersedianya Perencanaan dan Pengendalian Program Keciptakarya	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Keciptakarya	2 Dok	2 Dok	100
3	Terlaksananya kerjasama dengan satuan kerja/unit kerj/instansi terkait bidang keciptakarya sesuai pedoman keciptakarya	Jumlah Kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja/instansi terkait pembangunan bangunan gedung	20 Dok	20 Dok	100

4	Terbangunnya Bangunan Gedung Dan Lingkungan	Jumlah Bangunan Gedung dan Lingkungan untuk kepentingan Strategi daerah provinsi yang dibangun berkualitas	4 Unit	3 Unit	75
		Jumlah bangunan gedung dan lingkungan untuk kepentingan strategis daerah provinsi yang dilakukan rehabilitasi, renovasi dan ubahsuai	5 Unit	5 Unit	100

Sumber: Hasil Perhitungan dari Bidang Cipta Karya, 2022

Rumus Perhitungan:

a. Jumlah Kerjasama dengan Satuan Kerja/ Unit Kerja/ Instansi terkait bidang Keciaptakaryaan sesuai pedoman keciaptakaryaan

$x = \text{Jumlah Kerjasama dengan Satuan Kerja/Unit Kerja/Instansi terkait Pembangunan Bangunan Gedung pada tahun berjalan}$

b. Jumlah bangunan publik/ aparatur yang dibangun/direhab yang berkualitas oleh bidang cipta karya

$x = \text{Jumlah Bangunan Publik/Aparatur yang dibangun oleh Bidang Cipta Karya pada tahun berjalan}$

Tabel III.28. Perbandingan Capaian Kinerja Bidang Cipta Karya

No.	Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2021		
		2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah SDM yang terbina terkait keciptakaryaan						50 orang	50 orang	100
2.	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Keciaptakaryaan						2 Dok	2 Dok	100

3.	Jumlah Kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja/instansi terkait pembangunan bangunan gedung	20 Dok	20 Dok	100
4.	Jumlah Bangunan Gedung dan Lingkungan untuk kepentingan Strategi daerah provinsi yang dibangun berkualitas	4 Unit	3 Unit	75
5.	Jumlah bangunan gedung dan lingkungan untuk kepentingan strategis daerah provinsi yang dilakukan rehabilitasi, renovasi dan ubahsuai	5 Unit	5 Unit	100

Sumber: Hasil Perhitungan dari Bidang Cipta Karya, 2022

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Indikator kinerja SDM terbina terkait keciptakaryaan dari target 50 orang telah terpenuhi pada tahun 2022 dengan capaian kinerja 100%. termasuk dokumen kajian teknis keciptakaryaan juga terlaksana 100% sesuai target sebanyak 2 dokumen. Indikator kinerja jumlah kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja/instansi terkait pembangunan bangunan gedung pada tahun 2022 telah tercapai 100%, dimana target 20 dokumen telah terlaksana seluruhnya. Selanjutnya untuk bangunan gedung dan lingkungan untuk kepentingan strategi daerah provinsi yang dibangun berkualitas ditargetkan sebanyak 4 unit realisasi tercapai sebanyak 3 unit atau artinya kinerja 75% tercapai. Sedangkan jumlah bangunan gedung dan lingkungan untuk kepentingan strategis daerah provinsi yang dilakukan rehabilitasi, renovasi, dan ubahsuai ditargetkan 5 unit di tahun 2022 dan terealisasi 100%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait (Time Series)

Target indikator kinerja jumlah SDM yang terbina terkait keciptakaryaannya, dokumen kajian teknis keciptakaryaannya, dan jumlah bangunan gedung dan lingkungan untuk kepentingan strategis daerah provinsi yang dilakukan rehabilitasi, renovasi, dan ubahsuai merupakan indikator kinerja yang baru dilaksanakan di tahun 2022 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk indikator kinerja jumlah kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja/instansi terkait pembangunan bangunan gedung pada tahun 2022 mengalami peningkatan realisasi dibanding tahun 2021. Selanjutnya untuk bangunan gedung dan lingkungan untuk kepentingan strategi daerah provinsi yang dibangun berkualitas mengalami penurunan target jika dibandingkan tahun 2021 sebanyak 10 unit, sedangkan di tahun 2022 ditargetkan 4 unit dan realisasi tercapai 75% pada pelaksanaannya.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Kinerja Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan pada tahun 2022 keseluruhan memenuhi target 100%, dimana untuk pekerjaan pembinaan SDM terkait keciptakaryaannya dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Teknis Bangunan dan Lingkungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Bangunan dan Lingkungan.

Sedangkan indikator kinerja terkait dokumen kajian teknis keciptakaryaannya telah terlaksana di tahun 2022 seperti kegiatan Review Desain Pembangunan Geopark Kabupaten/Kota dan FS Makam Tokoh Masyarakat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Capaian 100% juga terlaksana pada indikator kinerja jumlah bangunan gedung dan lingkungan untuk kepentingan strategis daerah provinsi yang dilakukan rehabilitasi, renovasi, dan ubahsuai seperti pada pekerjaan: Rehabilitasi Berat Gedung UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi, Pembangunan Sarana Prasarana Samsat Amuntai, Rehabilitasi Anjungan Kalsel TMII, Renovasi Stadion 17 Mei di Banjarmasin Tahap I (tribun Inggris), dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Mesjid Sabilal Muhtadin.

Indikator kinerja jumlah kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja/instansi terkait pembangunan bangunan gedung pada tahun 2022 terealisasi 100% dengan 20 dokumen yang terdiri dari: Hasil estimasi rencana anggaran biaya pembangunan

baru dan perawatan gedung berdasarkan analisa tingkat kerusakannya atas permintaan instansi terkait disampaikan tepat waktu dan sesuai standar yang berlaku (12 dokumen), Pendampingan teknis terhadap KL/PD terkait administrasi teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai peraturan yang berlaku (6 dokumen), dan Pengelolaan Administrasi Rumah Negara Sesuai Peraturan Yang Berlaku (2 dokumen).

Selanjutnya untuk bangunan gedung dan lingkungan untuk kepentingan strategi daerah provinsi yang dibangun berkualitas terealisasi 75% atau sebanyak 3 unit terdiri dari: Pembangunan Kantor BIN Daerah Kalsel, Pembangunan Kantor Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Tahap I, dan Site Development Masjid Perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan pekerjaan yang mengalami keterlambatan yaitu pembangunan tugu pal nol dan dilakukan penambahan waktu 50 hari kalender dengan denda. Keterlambatan ini dikarenakan lokasi pekerjaan terletak di kawasan publik, banyaknya event/kegiatan di lokasi tersebut mengakibatkan terhambatnya proses pekerjaan dan drop material, disamping itu juga karena faktor cuaca yang tidak menentu.

4. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian kinerja pada Pembinaan Teknis Penyehatan Lingkungan, Air Minum dan Bangunan Jalan pada tahun 2021 tidak lepas dari dukungan program dan kegiatan yang terlaksana pada tahun 2021 yaitu Program Penataan Bangunan Gedung dan Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya dengan kegiatan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi; dan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi, dan, Penataan Bangunan dan Lingkungan.

5. Bidang Bina Konstruksi

Sasaran program Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan adalah “*Meningkatnya Kapasitas Tertib Penyelenggaraan Konstruksi berupa Tertib Penyelenggara Lelang, Tertib Administrasi Kontrak, Tertib Konstruksi Berkelanjutan dan Tertib Manajemen Mutu*” dan didukung oleh beberapa indikator.

Tabel III.29. Capaian Kinerja Kepala Bidang Bina Konstruksi

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
SP.3	Meningkatnya kualitas Jasa Konstruksi dan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi	1. Persentase Pemda di Provinsi yang Menginput Informasi Pembina Jasa Konstruksi dalam SIPJAKI dengan lengkap	70%	65%	92,8%
		2. Persentase Meningkatnya kualitas SDM Jasa Konstruksi yang Kompeten dan bersertifikat	18%	21,09%	117,17%
		3. Persentasi Meningkatnya tertib Jasa Konstruksi	5%	15%	300%
Rata-Rata Capaian					169,99%

Sumber: Hasil Perhitungan dari Bidang Bina Konstruksi, 2022

Rumus Perhitungan:

a. Persentase Pemda di Provinsi yang Menginput Informasi Pembina Jasa Konstruksi dalam SIPJAKI dengan lengkap

$$x = \frac{\text{Jumlah data SIPJAKI yang diinput}}{\text{Jumlah data SIPJAKI yang seharusnya diinput}} \times 100\%$$

b. Prosentasi Meningkatnya Kualitas SDM Jasa Konstruksi yang Kompeten dan Bersertifikat

$$x = \frac{\text{Jumlah peserta yang meperoleh sertifikat}}{\text{Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan}} \times 100\%$$

b. Prosentasi Meningkatnya Tertib Jasa Konstruksi

$$x = \frac{\text{Jumlah paket pekerjaan yang tertib Jasa Konstruksi sesuai NSPK (Norma, Standar)}}{\text{Jumlah paket pekerjaan yang diawasi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Tabel III.30. Perbandingan Capaian Kinerja Bidang Bina Konstruksi

No.	Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2022		
		2017	2018	2019	2020	2020	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Pemda di Provinsi yang Menginput Informasi Pembina Jasa Konstruksi dalam SIPJAKI dengan lengkap	N/A	70	70	70	70	70%	65%	92,8%
2.	Persentase Meningkatnya kualitas SDM Jasa Konstruksi yang Kompeten dan bersertifikat	N/A	15	18	25,3	25,3	18%	21,09%	117,17%
3.	Persentase Meningkatnya tertib Jasa Konstruksi	N/A	N/A	20	24	24	5%	15%	300%
Rata-rata Capaian								101,67%	

Sumber: Hasil Perhitungan dari Bidang Bina Konstruksi, 2021

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Persentase Pemda di Provinsi yang Menginput Informasi Pembina Jasa Konstruksi dalam SIPJAKI dengan lengkap

Target Indikator Prosentasi pengembangan sistem informasi Pembina jasa konstruksi yang terintegrasi melalui 3 layanan dasar (Sipjaki) pada tahun 2022 ini terealisasi sebesar 65% atau 5% dibawah target yang seharusnya 70 %. Hal ini dikarenakan pada tahun ini terdapat perubahan dan penambahan fitur-fitur baru yang baru disosialisasikan pada bulan November 2022, sehingga belum semua data dapat diinput sesuai peraturan yang berlaku.

Persentase Meningkatnya kualitas SDM Jasa Konstruksi yang Kompeten dan bersertifikat

Realisasi prosentasi meningkatnya kualitas SDM jasa konstruksi yang kompeten dan bersertifikat diperoleh dari 3 (tiga) kali pelatihan tenaga ahli yang dilaksanakan dihasilkan sebanyak 134 orang dengan rincian : a). Pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli (ahli muda teknik sipil) yang dilaksanakan tanggal 28-30 Juni 2022 dihasilkan 70 orang, b). Pelatihan dan Bimbingan Teknis Manajemen Keselamatan Konstruksi TA. 2022 Angkatan I, yang dilaksanakan tanggal 21-25 Maret 2022 menghasilkan 29 orang, c). Pelatihan dan Bimbingan Teknis Manajemen Keselamatan Konstruksi TA. 2022 Angkatan II, yang dilaksanakan bersama antara Dinas PUPR Provinsi

Kalimantan Selatan, Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Dinas PUPR Kota Banjarmasin pada tanggal 24-28 Oktober 2022 menghasilkan 35 orang dari Provinsi, 30 orang dari Kabupaten HSU, 45 orang dari Kota Banjarmasin sehingga jumlah adalah 110 orang. Hasil Kegiatan peserta yang mengikuti peningkatan Ka Berdasarkan data tersebut jumlah tenaga ahli jasa konstruksi yang dihasilkan total berjumlah 209 orang. Kemudian dari Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan yang diikuti 80 orang peserta dan unsur pembina jasa konstruksi kabupaten/kota se Provinsi Kalimantan Selatan. Dari Jumlah tersebut dihasilkan Jumlah SDM/Tenaga Ahli Jasa Konstruksi yang kompeten baik laki-laki maupun perempuan berjumlah 289 orang. Sehingga dibandingkan dengan target pada perencanaan strategis 2022-2026 berjumlah 1.370 pada akhir tahun 2026, maka diperoleh prosentasi sebesar 21,09% dari target 18%. Dengan demikian capaian yang diperoleh adalah 117,17%.

Persentasi Meningkatnya tertib Jasa Konstruksi

Target indikator prosentasi meningkatnya tertib jasa konstruksi pada tahun 2022 ini adalah 5%. Target ini didasarkan pada masih belum terbitnya permen PUPR terkait sebagai turunan dari UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Namun berdasarkan hasil pengawasan terhadap kepatuhan penyedia dalam melaksanakan Pedoman NSPK pengawasan, diperoleh data realisasi prosentasi meningkatnya tertib jasa konstruksi sebesar 15%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait (Time Series)

Persentase Pemda di Provinsi yang Menginput Informasi Pembina Jasa Konstruksi dalam SIPJAKI dengan lengkap

Realisasi indikator prosentasi pengembangan sistem informasi pembina jasa konstruksi yang terintegrasi melalui 3 layanan dasar (Sipjaki) pada tahun 2022 ini relatif menurun yakni hanya 65% atau 5% dibawah tahun sebelumnya 70 %. Dengan demikian capaian yang diperoleh adalah hanya 92,8%.

Persentase Meningkatnya kualitas SDM Jasa Konstruksi yang Kompeten dan bersertifikat

Realisasi prosentasi meningkatnya kualitas SDM/Tenaga Ahli Jasa Konstruksi yang kompeten dan bersertifikat dari segi jumlah tenaga ahli jasa konstruksi yang dihasilkan sebanyak 209 orang. Kemudian dari Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan yang diikuti 80 orang peserta dan unsur pembina jasa konstruksi kabupaten/kota se Provinsi Kalimantan Selatan. Dari Jumlah tersebut dihasilkan Jumlah SDM/Tenaga

Ahli Jasa Konstruksi yang kompeten baik laki-laki maupun perempuan berjumlah 289 orang. Sehingga dibandingkan dengan target pada perencanaan strategis 2022-2026 berjumlah 1.370 pada akhir tahun 2026, maka diperoleh prosentasi sebesar 21,09% dari target 18%. Dengan demikian capaian yang diperoleh adalah 117,17%.

Persentasi Meningkatnya tertib Jasa Konstruksi

Realisasi indikator prosentasi meningkatnya tertib jasa konstruksi pada tahun 2022 ini mencapai 15%. Hal ini jauh lebih besar dari realisasi tahun sebelumnya masih 5%.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Persentase Pemda di Provinsi yang Menginput Informasi Pembina Jasa Konstruksi dalam SIPJAKI dengan lengkap

Realisasi indikator prosentasi pengembangan sistem informasi pembina jasa konstruksi yang terintegrasi melalui 3 layanan dasar (Sipjaki) pada tahun 2022 ini hanya 65% atau 5% dibawah target renstra sebesar 70 %.

Persentase Meningkatnya kualitas SDM Jasa Konstruksi yang Kompeten dan bersertifikat

Realisasi prosentasi meningkatnya kualitas SDM jasa konstruksi yang kompeten dan bersertifikat dari segi jumlah tenaga ahli jasa konstruksi yang dihasilkan sebanyak 209 orang. Jumlah tersebut lebih banyak dari sebelumnya. Namun jika dibandingkan dengan target pada perencanaan strategis 2022-2026 berjumlah 1.370 pada akhir tahun 2026, maka diperoleh prosentasi sebesar 15,3% dibawah target renstra sebesar 18%.

Persentasi Meningkatnya tertib Jasa Konstruksi

Realisasi indikator prosentasi meningkatnya tertib jasa konstruksi pada tahun 2022 ini mencapai 15%. Hal ini jauh lebih besar dari target renstra sebesar 5%.

4. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian sasaran program Bidang Bina Konstruksi yang dimiliki oleh Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan yaitu "*Meningkatnya kualitas Jasa Konstruksi dan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi*" tidak lepas dari dukungan program dan kegiatan yang terlaksana pada tahun 2022 yaitu **Program Pengaturan Jasa Konstruksi**.

Capaian kinerja Kepala Bidang Bina Konstruksi tak luput dari dukungan seksi-seksi yang ada di bidang Bina Konstruksi.

1. Seksi Pemberdayaan

Tabel III.31. Capaian Kinerja Bidang Bina Konstruksi

No.	Sasaran Kegiatan	Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Seksi Pemberdayaan					
1	Terlaksananya Pemberdayaan SDM Profesional yang kompeten di bidang jasa konstruksi	Jumlah SDM / Tenaga Ahli Jasa Konstruksi yang kompeten baik laki-laki maupun perempuan	140 orang	289 orang	206,43 %
		Jumlah dokumen analisa kebutuhan pelatihan yang termanfaatkan selama 5 tahun	2 Dok	2 Dok	100 %
		Jumlah kab/ kota yang terbina terkait Jasa Konstruksi	13 Kab / Kota	13 Kab / Kota	100 %

Sumber: Hasil Perhitungan dari Bidang Bina Konstruksi, 2022

Rumus Perhitungan:

Jumlah SDM / Tenaga Ahli Jasa Konstruksi yang kompeten baik laki-laki maupun perempuan

$$x = \text{Jumlah SDM Jasa Konstruksi yang dilaksanakan satuan kerja}$$

Jumlah dokumen Analisa kebutuhan pelatihan yang termanfaatkan selama 5 tahunan

$$x = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang mencakup kebutuhan TNA di 13 Kabupaten / Kota yang dilaksanakan oleh satuan kerja}}{13}$$

Jumlah kab/kota yang terbina terkait jasa konstruksi

$$x = \frac{\text{Jumlah SDM ASN dan Penyedia jasa konstruksi (konsultan atau kontraktor) yang mendapatkan wawasan dan informasi kegiatan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh satuan kerja}}{\text{Jumlah kab/kota}}$$

Tabel III.32. Perbandingan Capaian Kinerja Bidang Bina Konstruksi

No.	Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2022		
		2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah SDM / Tenaga Ahli Jasa Konstruksi yang kompeten baik laki-laki maupun perempuan	N/A	N/A	40	85	158 orang	140 orang	289 orang	206,43 %
2.	Jumlah dokumen Analisa kebutuhan pelatihan yang termanfaatkan selama 5 tahunan	N/A	N/A	N/A	N/A	2 dokumen	2 Dok	2 Dok	100 %

3.	Jumlah kab/kota yang terbina terkait jasa konstruksi	N/A	N/A	N/A	N/A	13 Kab/	13 Kab / Kota	13 Kab / Kota	100 %
----	--	-----	-----	-----	-----	---------	---------------	---------------	-------

Sumber: Hasil Perhitungan dari Bidang Bina Konstruksi, 2022

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Jumlah SDM/Tenaga Ahli Jasa Konstruksi yang kompeten baik laki-laki maupun perempuan

Target indikator jumlah SDM / tenaga ahli jasa konstruksi yang kompeten baik laki-laki maupun perempuan pada tahun 2022 adalah 125 orang. Target tersebut meliputi target jumlah SDM/tenaga ahli jasa konstruksi yang terlatih sebanyak 105 orang dan jumlah SDM/tenaga konstruksi yang tersertifikasi SKA sebanyak 20 orang. Berdasarkan pelaksanaan 3 (tiga) kali pelatihan tenaga ahli yang dilaksanakan dihasilkan sebanyak 134 orang dengan rincian : a). Pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli (ahli muda teknik sipil) yang dilaksanakan tanggal 28-30 Juni 2022 dihasilkan 70 orang dan 47 orang diantaranya berhasil mengikuti fasilitasi sertifikasi SKA. Jumlah SDM yang dihasilkan sebanyak 21 orang perempuan dan 49 orang laki-laki. b). Pelatihan dan Bimbingan Teknis Manajemen Keselamatan Konstruksi TA. 2022 Angkatan I, yang dilaksanakan tanggal 21-25 Maret 2022 menghasilkan 29 orang memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat dari 35 orang peserta dengan rincian 6 orang perempuan dan 23 orang laki-laki. c). Pelatihan dan Bimbingan Teknis Manajemen Keselamatan Konstruksi TA. 2022 Angkatan II, yang dilaksanakan tanggal 24-28 Oktober 2022 menghasilkan 35 orang memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat dari 39 orang peserta dengan rincian 15 orang perempuan dan 20 orang laki-laki. Pelatihan dan Bimbingan Teknis Manajemen Keselamatan Konstruksi TA. 2022 Angkatan II, yang dilaksanakan bersama antara Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Dinas PUPR Kota Banjarmasin pada tanggal 24-28 Oktober 2022 menghasilkan 35 orang dari Provinsi, 30 orang dari Kabupaten HSU, 45 orang dari Kota Banjarmasin sehingga jumlah adalah 110 orang. Hasil Kegiatan peserta yang mengikuti peningkatan Ka Berdasarkan data tersebut jumlah tenaga ahli jasa konstruksi yang dihasilkan total berjumlah 209 orang. Kemudian dari Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan yang diikuti 80 orang peserta dan unsur pembina jasa konstruksi kabupaten/kota se Provinsi Kalimantan Selatan. Dari Jumlah tersebut dihasilkan Jumlah SDM/Tenaga Ahli Jasa Konstruksi yang kompeten baik laki-laki maupun perempuan berjumlah 289 orang. Sehingga dibandingkan dengan target

pada perencanaan strategis 2022-2026 berjumlah 1.370 pada akhir tahun 2026, maka diperoleh prosentasi sebesar 21,09% dari target 18%. Dengan demikian capaian yang diperoleh adalah 117,17%.

Jumlah Dokumen Analisa Kebutuhan Pelatihan yang termanfaatkan selama 5 tahunan

Target indikator jumlah dokumen analisa kebutuhan pelatihan yang termanfaatkan selama 5 tahunan ada 2 (dua) dokumen dengan realisasi pencapaian sebanyak 2 (dua) dokumen. Berdasarkan jumlah tersebut realisasi capaian kinerja adalah 100%.

Jumlah Kabupaten/kota yang terbina terkait Jasa Konstruksi

Target indikator jumlah kabupaten/kota yang terbina terkait jasa konstruksi adalah 13 kabupaten/kota yakni seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Pembinaan tersebut meliputi Rapat Koordinasi Tim Pembina Jasa Konstruksi Propinsi dan Kabupaten/kota se-Propinsi Kalimantan Selatan, Kunjungan koordinasi yang dilakukan ke kabupaten/kota maupun kunjungan konsultasi Pembina jasa konstruksi kabupaten/kota ke provinsi, Kegiatan sosialisasi peraturan terbaru, diantaranya Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dengan mengundang seluruh kabupaten/kota.2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait (Time Series)

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Analisis peningkatan kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

- Peningkatan capaian diperoleh karena banyaknya peminat peserta yang ikut pelatihan sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan efisiensi pelaksanaan.
- Capaian kinerja dari segi jumlah dokumen adalah tetap, namun dari segi kualitas terdapat peningkatan.

4. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian sasaran program Bidang Bina Konstruksi yang dimiliki oleh Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan yaitu "*Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi dan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi*" tidak lepas dari dukungan program dan kegiatan yang terlaksana pada tahun 2022 yaitu **Program Pengaturan Jasa Konstruksi** dengan kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi.

2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pengaturan

Tabel III.33. Perbandingan Capaian Kinerja Bidang Bina Konstruksi

No.	Sasaran Kegiatan	Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Seksi Monev dan Pengaturan					
1	Terlaksananya Pembinaan dan monitoring Evaluasi Pengaturan Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen laporan SIPJAKI yang akurat dan terintegrasi	2 Dok	2 Dok	100 %
		Jumlah kabupaten/ kota yang melaksanakan Sistem SIPJAKI sesuai dengan peraturan yang berlaku	13 Kab / Kota	3 Kab / Kota	23 %

Sumber: Hasil Perhitungan dari Bidang Bina Konstruksi, 2022

Rumus Perhitungan:

Jumlah dokumen laporan SIPJAKI yang akurat dan terintegrasi

$x =$ Jumlah dokumen yang dihasilkan pada tahun berjalan

Jumlah Kabupaten/kota yang melaksanakan Sistem SIPJAKI sesuai dengan peraturan yang berlaku

$x =$ Jumlah kab/kota yang menginput dan memenuhi kriteria informasi jasa konstruksi

Tabel III.34. Perbandingan Capaian Kinerja Bidang Bina Konstruksi

No.	Indikator Kinerja	Realisasi					Target	Tahun 2020	
		2016	2017	2018	2019	2020		Realisasi	Capaian
1.	Jumlah dokumen laporan SIPJAKI yang akurat dan terintegrasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100%
2.	Jumlah Kabupaten/kota yang melaksanakan Sistem SIPJAKI sesuai dengan peraturan yang berlaku	N/A	N/A	N/A	13 kab/kota	13 kab/kota	13 Kab/Kota	13 kab/kota	100%

Sumber: Hasil Perhitungan dari Bidang Bina Konstruksi, 2021

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Jumlah Dokumen Laporan SIPJAKI yang Akurat dan Terintegrasi

Target indikator jumlah dokumen Laporan SIPJAKI yang akurat dan terintegrasi ada 2 (dua) dokumen dengan realisasi pencapaian sebanyak 2 (dua) dokumen. Dokumen laporan tersebut meliputi Pelatihan Administrator Aplikasi Sipjaki provinsi dan 13 kabupaten/kota se Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 35 orang peserta dan Pelatihan dan inputing Aplikasi Monjaki Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan

sebanyak 35 orang peserta . Berdasarkan jumlah tersebut realisasi capaian kinerja adalah 100%.

Jumlah Kabupaten/kota yang melaksanakan Sistem SIPJAKI sesuai dengan peraturan yang berlaku

Target indikator jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan Sistem SIPJAKI sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah 13 kabupaten/kota yakni seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil monitoring kegiatan tersebut pada aplikasi baru terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota yang aktif menginput sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarbaru, sehingga realisasi capaian kinerja hanya 23%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait (Time Series)

Jumlah Dokumen Laporan SIPJAKI yang Akurat dan Terintegrasi

Capaian kinerja indikator jumlah dokumen Laporan SIPJAKI yang akurat dan terintegrasi pada tahun 2022 sama dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 100 %.

Jumlah Kabupaten/kota yang melaksanakan Sistem SIPJAKI sesuai dengan peraturan yang berlaku

Capaian kinerja indikator jumlah dokumen Laporan SIPJAKI yang akurat dan terintegrasi pada tahun 2022 Cuma 23 %, terdapat penurunan capaian kinerja indikator dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 100 %.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Penurunan capaian kinerja pada tahun ini disebabkan beberapa faktor, yakni :

- Ada perubahan dan penambahan fitur-fitur baru pada aplikasi SIPJAKI versi terbaru. Kegiatan sosialisasi baru dilaksanakan pada bulan Nopember 2022 sehingga belum semua administrator kabupaten/kota memahaminya.
- Sering bergantinya pejabat admintrator aplikasi di daerah karena mutasi maupun promosi ke unit kerja lain, sementara administrator yang baru belum dilatih.
- Belum terinventarisasinya seluruh data yang diperlukan selama tahun anggaran yang berada pada unit lain.

Upaya yang perlu dilakukan pada tahun mendatang antara lain, yakni :

- Kegiatan sosialisasi dan pelatihan administrator Aplikasi Sipjaki dilakukan di awal tahun.
- Perlunya monitoring baik langsung maupun melalui media aplikasi terhadap kepatuhan dan melaksanakan penginputan sesuai peraturan yang berlaku.
- Perlunya inovasi dalam mendapatkan data yang diperlukan.

4. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian sasaran program Bidang Bina Konstruksi yang dimiliki oleh Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan yaitu “*Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi dan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi*” tidak lepas dari dukungan program dan kegiatan yang terlaksana pada tahun 2022 yaitu **Program Pengaturan Jasa Konstruksi** dengan kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi.

3. Seksi Pengawasan

Tabel III.35. Perbandingan Capaian Kinerja Bidang Bina Konstruksi

No.	Sasaran Kegiatan	Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Seksi Pengawasan					
1	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tertib Usaha Jasa, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Konstruksi	Jumlah dokumen pedoman jasa konstruksi yang dimanfaatkan	1 dok	1 dok	100 %
		Jumlah dokumen laporan pengawasan bidang di Lingkup Dinas PUPR Prov Kalsel sesuai pedoman Jasa Konstruksi	1 dok	1 dok	100 %

Sumber: Hasil Perhitungan dari Bidang Bina Konstruksi, 2022

Rumus Perhitungan:

Jumlah dokumen Pedoman Jasa Konstruksi

$x =$ Jumlah dokumen yang dihasilkan pada tahun berjalan

Jumlah dokumen laporan pengawasan bidang lingkup Dinas PUPR Prov. Kalsel

$x =$ Jumlah dokumen yang terinput dan memenuhi kriteria informasi jasa konstruksi

Tabel III.36. Perbandingan Capaian Kinerja Bidang Bina Konstruksi

No.	Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2022		
		2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah dokumen Pedoman Jasa Konstruksi	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dok	1 dok	1 dok	100%
2.	Jumlah dokumen laporan pengawasan bidang lingkup Dinas PUPR Prov. Kalsel	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dok	1 dok	1 dok	100%

Sumber: Hasil Perhitungan dari Bidang Bina Konstruksi, 2022

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Jumlah Dokumen Laporan Pedoman Jasa Konstruksi yang dimanfaatkan

Target indikator jumlah dokumen pedoman jasa konstruksi yang dimanfaatkan ada 1 (satu) dokumen dengan realisasi pencapaian sebanyak 1 (satu) dokumen. Dokumen laporan tersebut adalah pembuatan aplikasi simak pengawasan jasa konstruksi. Berdasarkan jumlah tersebut realisasi capaian kinerja adalah 100%.

Jumlah Dokumen Laporan Pengawasan Bidang di Lingkup Dinas PUPR Prov. Kalimantan Selatan sesuai pedoman Jasa Konstruksi

Target indikator jumlah dokumen laporan pengawasan bidang di Lingkup Dinas PUPR Prov Kalsel sesuai pedoman Jasa Konstruksi ada 1 (satu) dokumen dengan realisasi pencapaian sebanyak 1 (satu) dokumen. Dokumen laporan tersebut adalah pembuatan aplikasi simak pengawasan jasa konstruksi. Berdasarkan jumlah tersebut realisasi capaian kinerja adalah 100%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait (Time Series)

Jumlah Dokumen Laporan Pedoman Jasa Konstruksi yang dimanfaatkan

Capaian kinerja indikator jumlah dokumen Laporan SIPJAKI yang akurat dan terintegrasi pada tahun 2022 sama dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 100 %.

Jumlah Dokumen Laporan Pengawasan Bidang di Lingkup Dinas PUPR Prov. Kalimantan Selatan sesuai pedoman Jasa Konstruksi

Capaian kinerja indikator jumlah dokumen Laporan SIPJAKI yang akurat dan terintegrasi pada tahun 2022 sama dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 100 %.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Capaian kinerja dari segi jumlah adalah tetap, namun dari segi kualitas terdapat peningkatan, hal ini disebabkan beberapa faktor, yakni :

- Pedoman pengawasan jasa konstruksi berupa Permen PUPR sudah dalam proses uji publik dan draf yang siap diundangkan. Sehingga kegiatan pengawasan jasa konstruksi dapat semakin terarah sesuai Undang-undang nomor 2 tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
- Sedang dikembangkan media pengawasan berupa aplikasi pengawasan yang akan terintegrasi dengan aplikasi pembinaan jasa konstruksi lainnya.

4. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian sasaran program Bidang Bina Konstruksi yang dimiliki oleh Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan yaitu *“Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi dan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi”* tidak lepas dari dukungan program dan kegiatan yang terlaksana pada tahun 2022 yaitu **Program Pengaturan Jasa Konstruksi** dengan kegiatan Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

6. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

Sasaran program Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan adalah “*Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pertanahan Daerah*” dan didukung oleh beberapa indikator.

Tabel III.37. Capaian Kinerja Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	
				Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SP.5	Meningkatnya kepatuhan terhadap RTRW	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	86%	85,90%	99,88%
		Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Selesai Tepat Waktu	20%	108,43%	542,14%
		Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Selesai Tepat Waktu	20%	20,00%	100,00%
		Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Selesai Tepat Waktu	20%	40,00%	200,00%
		Persentase Aset Tanah Provinsi untuk Infrastruktur yang Dibebaskan oleh Seksi Pertanahan Dinas PUPR	20%	93,33%	466,67%
Rata-Rata Capaian				281,74%	

Sumber: Hasil Perhitungan dari Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, 2022

Rumus Perhitungan:

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

$$x = \frac{\text{Pemanfaatan Ruang (Kondisi Existing)}}{\text{Rencana peruntukan atau pemanfaatan ruang}} \times 100\%$$

Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Selesai Tepat Waktu

$$x = \frac{\text{Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu}}{\text{Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum}} \times 100\%$$

Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Selesai Tepat Waktu

$$x = \frac{\text{Sengketa tanah garapan selesai tepat waktu}}{\text{Sengketa tanah garapan yang harus diselesaikan}} \times 100\%$$

Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Selesai Tepat Waktu

$$x = \frac{\text{Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan selesai tepat waktu}}{\text{Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang harus diselesaikan}} \times 100\%$$

Persentase Aset Tanah Provinsi untuk Infrastruktur yang Dibebaskan oleh Seksi Pertanahan Dinas PUPR

$$x = \frac{\text{Jumlah Data yang Terinventarisasi tepat waktu}}{\text{Target Data yang Bernilai Nol pada KIB A pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$$

Tabel III.38. Perbandingan Capaian Kinerja Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

No.	Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2021		
		2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang						86%	85,90%	99,88%
2	Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Selesai Tepat Waktu						20%	108,43%	542,14%
3	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Selesai Tepat Waktu						20%	20,00%	100,00%
4	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Selesai Tepat Waktu						20%	40,00%	200,00%
5	Persentase Aset Tanah Provinsi untuk Infrastruktur yang Dibebaskan oleh Seksi Pertanahan Dinas PUPR						20%	93,33%	466,67%

Sumber: Hasil Perhitungan dari Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, 2022

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Berbagai kendala Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan wilayah kabupaten/kota sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota diantaranya disebabkan oleh faktor; teknik operasional, administratif dan tuntutan perkembangan pasar. Kecenderungan penyimpangan tersebut dapat terjadi karena produk rencana tata ruang kurang memperhatikan aspek-aspek pelaksanaan (pemanfaatan ruang) atau sebaliknya bahwa pemanfaatan ruang kurang memperhatikan rencana tata ruang yang telah disusun.

Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan Audit Tata Ruang di Kabupaten Barito Kuala untuk mengevaluasi produk rencana tata ruang yang telah ada untuk melihat apakah produk rencana tata ruang tersebut berjalan sesuai dengan pemanfaatannya atau telah terjadi penyimpangan. Kegiatan evaluasi ini lebih ditekankan pada kegiatan pemantauan penyimpangan terhadap pemanfaatan ruang yang merupakan bagian dari kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang dalam pengendalian.

Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Selesai Tepat Waktu

Realisasi yang dicapai pada tahun 2022 ini telah melebihi target tahun 2022, hal ini berkaitan dengan realisasi dan capaian Kepala Seksi Pertanahan untuk luasan pada indikator Jumlah Luasan Pengadaan Tanah di Tahun Berjalan, yaitu 34,6969 Ha yang telah melebihi target Akhir Renstra 2026 sebesar 32 Ha (penjabaran dapat dilihat pada penjelasan Perbandingan realisasi dengan capaian beberapa tahun berjalan untuk Kepala Seksi Pertanahan).

Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Selesai Tepat Waktu

Realisasi yang dicapai pada tahun 2022 ini telah memenuhi target, yaitu telah dilaksanakan proses Konsinyasi di Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk Pembebasan Lahan Jalan Akses Bandara Baru Syamsudin Noor, Konsinyasi di Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk Pembebasan Lahan Jalan Lingkar Utara Banjarbaru atas nama Hj. Eliza Ruswita, dan Konsinyasi di Pengadilan Negeri Martapura untuk Pembebasan Lahan Jalan Alternatif Akses ke Makam Syech M. Arsyad Al-Banjari.

Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Selesai Tepat Waktu

Realisasi yang dicapai pada tahun 2022 ini telah melebihi target karena telah dilaksanakan 8 (delapan) Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk 8 (delapan) Pembebasan Lahan sebagai berikut :

- Pembebasan Lahan Kolam Regulasi Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Lanjutan Pembebasan Lahan Jalan Handil Bakti - Lingkar Utara Tahap II;
- Pembebasan Lahan Jalan Akses Bandara Baru Syamsudin Noor Tahap II;
- Pembebasan Lahan Jembatan Panjang;

- Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Gudang Logistik BPBD;
- Pembebasan Lahan Simpang 3 Jarak - Simpang Belangian;
- Pembebasan Lahan Embung Jaro (hanya Ganti Tanam Tumbuh);
- Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Kawasan Olahraga Terintegrasi;

Persentase Aset Tanah Provinsi untuk Infrastruktur yang Dibebaskan oleh Seksi Pertanahan Dinas PUPR

Realisasi yang dicapai pada tahun 2022 ini telah melebihi target karena terdapat kemajuan pencatatan pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A yang dikuasai oleh Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu berupa 42 data yang telah terisi luasan tanahnya dari yang awalnya ada 44 data luasan tanah yang bernilai nol. Rincian 42 data tersebut terdiri dari 23 data yang telah terisi luasan tanahnya pada KIB A Dinas PUPR Prov. Kalsel, 2 data belum terbaharui pada KIB A Dinas PUPR Prov. Kalsel, dan terdapat 17 data yang harga asetnya bernilai nol, atas arahan BPK 17 data tersebut untuk dihapuskan dari pencatatan KIB A Dinas PUPR Prov. Kalsel. Untuk 2 data belum ada luasan tanahnya karena belum terinventarisasi.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait (Time Series)

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Kedepannya kegiatan Audit Tata Ruang akan menjadi kegiatan Rutin setiap tahunnya dengan target dapat menghasilkan laporan audit di seluruh kabupaten/kota dan menjadi laporan audit Provinsi Kalimantan Selatan.

Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Selesai Tepat Waktu

- a. Untuk realisasi kinerja pada tahun 2022 ini lebih tinggi dari realisasi kinerja tahun 2021 karena realisasi pada tahun 2021 hanya 34,39% sedangkan pada 2022 ini sebesar 108,43%
- b. Untuk realisasi kinerja pada tahun 2022 ini lebih tinggi dari realisasi kinerja tahun 2022 karena realisasi pada tahun 2021, 2020, dan 2019.
- c. Realisasi yang dicapai pada tahun ini telah melebihi target tahun 2022 dan telah melebihi target Akhir Renstra 2026, hal ini berkaitan dengan realisasi dan capaian Kepala Seksi Pertanahan untuk luasan pada indikator Jumlah Luasan Pengadaan Tanah di Tahun Berjalan, yaitu 34,6969 Ha yang juga telah melebihi

target Akhir Renstra 2026 sebesar 32 Ha (penjabaran dapat dilihat pada penjelasan Perbandingan realisasi dengan capaian beberapa tahun berjalan untuk Kepala Seksi Pertanahan). Dengan capaian sampai dengan Tahun 2022 ini terhadap target Akhir Renstra, yaitu 108,43%.

Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Selesai Tepat Waktu

- a. Untuk indikator ini pertama kali ada di tahun 2022 jadi tidak ada perbandingan dengan tahun sebelumnya.
- b. Untuk indikator ini pertama kali ada di tahun 2022 jadi tidak ada perbandingan dengan beberapa tahun sebelumnya.
- c. Realisasi yang dicapai pada tahun 2022 ini telah memenuhi target tahun 2022 pada Renstra Dinas PUPR Prov. Kalsel, dengan capaian sampai dengan Tahun 2022 ini terhadap target Akhir Renstra, yaitu 27,27%.

Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Selesai Tepat Waktu

- a. Untuk indikator ini pertama kali ada di tahun 2022 jadi tidak ada perbandingan dengan tahun sebelumnya.
- b. Untuk indikator ini pertama kali ada di tahun 2022 jadi tidak ada perbandingan dengan beberapa tahun sebelumnya.
- c. Realisasi yang dicapai pada tahun 2022 ini telah memenuhi target tahun 2022 pada Renstra Dinas PUPR Prov. Kalsel, dengan capaian sampai dengan Tahun 2022 ini terhadap target Akhir Renstra, yaitu 40%.

Persentase Aset Tanah Provinsi untuk Infrastruktur yang Dibebaskan oleh Seksi Pertanahan Dinas PUPR

- a. Untuk indikator ini pertama kali ada di tahun 2022 jadi tidak ada perbandingan dengan beberapa tahun sebelumnya.
- b. Untuk indikator ini pertama kali ada di tahun 2022 jadi tidak ada perbandingan dengan beberapa tahun sebelumnya.
- c. Capaian sampai dengan Tahun 2022 ini terhadap target Akhir Renstra, yaitu 95,45%.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Upaya Yang Telah Dilakukan

Melaksanakan Kegiatan Audit Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diberi kewenangan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah, namun disamping kewenangan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu meningkatkan kemampuan memantau dan mengevaluasi pemanfaatan ruang yang berjalan untuk menilai kesesuaiannya terhadap rencana tata ruang wilayah yang telah di perdakan. Oleh karena ini perlu dirumuskan suatu kajian instrumen pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang yang berupa monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang.

Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang penting dalam hal untuk memonitor pemanfaatan ruang yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Barito Kuala dan untuk mengetahui tingkat efektifitas pemanfaatan ruang yang telah dilakukan, serta untuk mengevaluasi kegiatan pemanfaatan yang telah dilakukan. Sehingga dapat diperoleh rekomendasi pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga konsistensi pemanfaatan ruang eksisting terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan

Hambatan dalam Kinerja

- Minimnya Pengendalian pemanfaatan ruang ditingkatkan intensitas dan kapasitasnya dalam wujud: Peraturan zonasi, Perizinan, Insentif disinsentif dan Pemberian sanksi.
- Kurangnya realisasi penguasaan tanah oleh pemerintah agar perwujudan struktur dan pola ruang dalam rencana tata ruang menjadi lebih mudah terealisasi dengan meminimalisir masalah penguasaan tanah.
- Terbatasnya Anggaran SKPD diawali dari target pencapaian pola ruang dan struktur ruang agar tercipta keadaan eksisting yang mendekati rencana tata ruang.

Rencana Tindak Lanjut

- Perlunya Pengendalian pemanfaatan ruang ditingkatkan intensitas dan kapasitasnya dalam wujud: Peraturan zonasi, Perizinan, Insentif disinsentif dan Pemberian sanksi.

- Perlunya realisasi penguasaan tanah oleh pemerintah agar perwujudan struktur dan pola ruang dalam rencana tata ruang menjadi lebih mudah terealisasi dengan meminimalisir masalah penguasaan tanah.
- Perlunya Anggaran SKPD diawali dari target pencapaian pola ruang dan struktur ruang agar tercipta keadaan eksisting yang mendekati rencana tata ruang.

Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Selesai Tepat Waktu

Telah dilaksanakan proses pengadaan tanah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Beberapa hambatan dalam pelaksanaan pembebasan lahan, yaitu menunggu dokumen FS (Feasibility Study) dari bidang yang melaksanakan fisik pembangunan agar lahan yang dibebaskan sesuai dengan rencana pembangunan, serta ada beberapa ukuran lahan milik warga yang harus dikoreksi dan diukur ulang di lapangan. Untuk proses pensertifikatan lahan yang telah dibebaskan terhambat diproses pelepasan hak tanah dan pemecahan sertifikat.

Tindak lanjut untuk kendala tersebut pada proses pembebasan lahan, yaitu dilakukan koordinasi yang lebih intens dengan pihak-pihak terkait serta dibutuhkan support dari berbagai pihak terutama dari birokrasi dan pemerintah daerah yang menjadi lokasi pelaksanaan rencana pembebasan lahan, serta untuk tanah milik masyarakat yang diukur ulang dan baru mengumpulkan berkas akan dibayarkan pada tahun anggaran 2023. Tindak lanjut untuk pensertifikatan lahan milik pemerintah provinsi, yaitu dikoordinasikan dengan pihak terkait serta dianggarkan kembali dana untuk pensertifikatan lahan pada tahun anggaran 2023.

Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Selesai Tepat Waktu

Realisasi yang dicapai pada tahun 2022 ini telah memenuhi target, yaitu telah dilaksanakan proses Konsinyasi di Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk Pembebasan Lahan Jalan Akses Bandara Baru Syamsudin Noor, Konsinyasi di Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk Pembebasan Lahan Jalan Lingkar Utara Banjarbaru atas nama Hj. Eliza Ruswita, dan Konsinyasi di Pengadilan Negeri Martapura untuk Pembebasan Lahan Jalan Alternatif Akses ke Makam Syech M. Arsyad Al-Banjari.

Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Selesai Tepat Waktu

Realisasi yang dicapai pada tahun 2022 ini telah melebihi target karena telah dilaksanakan 8 (delapan) Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk 8 (delapan) Pembebasan Lahan sebagai berikut :

- Pembebasan Lahan Kolam Regulasi Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Lanjutan Pembebasan Lahan Jalan Handil Bakti - Lingkar Utara Tahap II;
- Pembebasan Lahan Jalan Akses Bandara Baru Syamsudin Noor Tahap II;
- Pembebasan Lahan Jembatan Panjang;
- Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Gudang Logistik BPBD;
- Pembebasan Lahan Simpang 3 Jarak - Simpang Belangian;
- Pembebasan Lahan Embung Jaro (hanya Ganti Tanam Tumbuh);
- Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Kawasan Olahraga Terintegrasi;

Persentase Aset Tanah Provinsi untuk Infrastruktur yang Dibebaskan oleh Seksi Pertanahan Dinas PUPR

Realisasi yang dicapai pada tahun 2022 ini telah melebihi target karena terdapat kemajuan pencatatan pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A yang dikuasai oleh Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu berupa 42 data yang telah terisi luasan tanahnya dari yang awalnya ada 44 data luasan tanah yang bernilai nol. Rincian 42 data tersebut terdiri dari 23 data yang telah terisi luasan tanahnya pada KIB A Dinas PUPR Prov. Kalsel, 2 data belum terbaharui pada KIB A Dinas PUPR Prov. Kalsel, dan terdapat 17 data yang harga asetnya bernilai nol, atas arahan BPK 17 data tersebut untuk dihapuskan dari pencatatan KIB A Dinas PUPR Prov. Kalsel. Untuk 2 data belum ada luasan tanahnya karena belum terinventarisasi.

4. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian sasaran program Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan yang dimiliki oleh Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan yaitu *"Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan daerah"* tidak lepas dari dukungan program dan kegiatan yang terlaksana pada tahun 2020 yaitu **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Pengadaan Tanah Untuk**

Kepentingan Umum, Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, dan, Program Penatagunaan Tanah.

Tabel III.39. Capaian Kinerja Kepala Seksi Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Penataan Ruang Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	
				Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Seksi Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Penataan Ruang					
1	Tersedianya Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah rekomendasi dan evaluasi gubernur terhadap rencana umum dan rencana rinci tata ruang kota/kabupaten yang ditindaklanjuti	3	2	66.67%
		Jumlah dokumen perencanaan, pengaturan, pembinaan dan pengawasan penataan ruang yang ditindaklanjuti	3	3	100%
		Jumlah orang yg mendapatkan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait penataan ruang	60	100	166.67%
		Jumlah Informasi Tata Ruang yang dipublikasikan	1	1	100%
		Jumlah laporan TKPRD	1	1	100%

Sumber: Hasil Perhitungan dari Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, 2021

Tabel III.40. Perbandingan Capaian Kinerja Kepala Seksi Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Penataan Ruang a Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

No.	Indikator Kinerja	Realisasi					Target	Tahun 2022	
		2017	2018	2019	2020	2021		Realisasi	Capaian
1	Jumlah rekomendasi dan evaluasi gubernur terhadap rencana umum dan rencana rinci tata ruang kota/kabupaten yang ditindaklanjuti						3	2	66.67%

2	Jumlah dokumen perencanaan, pengaturan, pembinaan dan pengawasan penataan ruang yang ditindaklanjuti	-	-	-	3	3	100%
	Jumlah orang yg mendapatkan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait penataan ruang				60	100	166.67%
	Jumlah Informasi Tata Ruang yang dipublikasikan				1	1	100%
	Jumlah laporan TKPRD				1	1	100%

Sumber: Hasil Perhitungan dari Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, 2022

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Dari Kelima Indikator pada Seksi Pengaturan, Pembinaan Dan Pengawasan Penataan Ruang, terdapat 3 indikator yang mencapai 100% yaitu Indikator Jumlah dokumen perencanaan, pengaturan, pembinaan dan pengawasan penataan ruang yang ditindaklanjuti, Jumlah Informasi Tata Ruang yang dipublikasikan serta Jumlah laporan TKPRD.

1 indikator yang melampaui 100% (166,67%) yaitu Jumlah orang yg mendapatkan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait penataan ruang.

Dan 1 indikator yang dibawah 100 % (66.67) Jumlah rekomendasi dan evaluasi gubernur terhadap rencana umum dan rencana rinci tata ruang kota/kabupaten yang ditindaklanjuti.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait (Time Series)

- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Indikator antara tahun 2022 dan 2023 berbeda setelah adanya perubahan Indikator Kinerja yang dimulai pada 2023.

Pada Tahun 2022 Indikator pada pada Seksi Pengaturan, Pembinaan Dan Pengawasan Penataan Ruang meliputi:

- a. Jumlah Dokumen revisi perda rencana tata ruang wilayah
- b. Jumlah rekomendasi dan evaluasi gubernur terhadap rencana umum dan rencana tata ruang kota/kabupaten

Sedangkan pada 2023, Indikator pada pada Seksi Pengaturan, Pembinaan Dan Pengawasan Penataan Ruang menjadi :

- a. Jumlah rekomendasi dan evaluasi gubernur terhadap rencana umum dan rencana rinci tata ruang kota/kabupaten yang ditindaklanjuti
- b. Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Penataan Ruang yang ditindaklanjuti
- c. Jumlah orang yg mendapatkan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait penataan ruang
- d. Jumlah Informasi Tata Ruang yang dipublikasikan
- e. Jumlah laporan TKPRD

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Upaya yang telah dilakukan:

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2035, sejak di perdakan tahun 2015 telah memasuki Proses Revisi Rencana Tata Ruang. Pada tahun 2022 ini Revisi RTRW Provinsi telah selesai berproses pada Perubahan Peruntukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dalam rangka Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Kalimantan Selatan, Integrasi wilayah darat dan wilayah laut serta Penyempurnaan dokumen Integrasi KLHS.

Hambatan dalam Pencapaian Kinerja:

Aturan-aturan Pemerintah Pusat yang terus berubah membuat Pemerintah Daerah terus menyesuaikan dokumen perencanaan dan kelengkapannya.

Rencana Tindak Lanjut:

Setelah Penyelesaian Perubahan Peruntukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dalam rangka Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Kalimantan Selatan, Integrasi wilayah darat dan wilayah laut

serta Penyempurnaan dokumen Integrasi KLHS. Pada tahun 2023 direncanakan dokumen raperda RTRW Provinsi Kalimantan Selatan dapat segera dilegalkan

4. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian sasaran program Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan yang dimiliki oleh Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan yaitu “*Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan daerah*” tidak lepas dari dukungan program dan kegiatan yang terlaksana pada tahun 2020 yaitu **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang** dengan kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi, dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi.

Tabel III.41. Capaian Kinerja Kepala Seksi Penataan Ruang Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	
				Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Seksi Penataan Ruang					
1	Terlaksananya penataan ruang wilayah provinsi dan pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang provinsi	Jumlah keterangan pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti	2	2	100%
		Jumlah dokumen program pemanfaatan ruang yang tersinkronisasi	2	2	100%

Sumber: Hasil Perhitungan dari Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, 2022

1. Perbandingan Realisasi dengan target per tahun 2022

Realisasi kinerja pada tahun ini tercapai sesuai dengan target. Capaian kinerja untuk indikator jumlah keterangan pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti adalah 2. Sedangkan capaian kinerja untuk indikator jumlah dokumen program pemanfaatan ruang yang tersinkronisasi adalah 2. Capaian kinerja tersebut juga memenuhi rata-rata capaian per sasaran/kinerja utama.

Realisasi kinerja terkait dengan progress pelaksanaan kegiatan berikut:

1. Fasilitasi Pembahasan Optimalisasi Mitigasi Perubahan Iklim dan Bencana Kawasan Rawan Banjir.

2. Fasilitasi Pembahasan Konsolidasi Tugas FPR dan Pembahasan PKKPR.
3. Fasilitasi Pembahasan Rapat Pembahasan Persetujuan PKKPR Kegiatan Jaringan Distribusi 20 kV Provinsi Kalimantan Selatan PT. PLN (Persero) UIW Kalselteng.
4. Fasilitasi Pembahasan Rapat Pembahasan dengan Kabupaten/Kota Perihal Persetujuan PKKPR Kegiatan Jaringan Distribusi 20 kV Provinsi Kalimantan Selatan PT. PLN UIW Kalselteng.
5. Fasilitasi Pembahasan Peningkatan Kinerja Daerah Tangkapan Air.
6. Fasilitasi Pembahasan Dialog Pemanfaatan Ruang Perkotaan Berkelanjutan.
7. Fasilitasi Pembahasan Identifikasi Isu Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Badan Air.
8. Fasilitasi Pembahasan Pengembangan Kawasan Prioritas Metropolitan Banjarbakula.
9. Fasilitasi Pembahasan Inventarisasi Pemanfaatan Ruang Perkotaan dan Penataan Kawasan.
10. Fasilitasi Pembahasan Restorasi Ekologis di Kawasan Lahan Kritis, Lahan Gambut, Lahan Terlarang, dan Lahan Terbuka.
11. Fasilitasi Pembahasan Perlindungan dan Pengelolaan Lahan Rawa di Kawasan Hidrologi Gambut.
12. Fasilitasi Pembahasan Mewujudkan Daerah yang Berkelanjutan dan Berketahanan.
13. Fasilitasi Pembahasan Pengembangan Kawasan Pariwisata Berbasis Konservasi Geologi dan Sumber Air.
14. Fasilitasi Pembahasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Perkotaan.
15. Fasilitasi Pembahasan Pembahasan Analisa Rencana Keruangan Pembangunan SUTT 150 kV Gl. Sei. Durian – Gl. Tarjun, Ext Gl. Tarjun, dan Pembahasan Perubahan Delineasi Kawasan Peruntukan Industri Jorong.
16. Fasilitasi Pembahasan Pengembangan Kawasan Pariwisata Berbasis Jasa Lingkungan Hutan dan Budaya Pedalaman.
17. Fasilitasi Pembahasan Peningkatan Mitigasi di Kawasan Rawan Bencana.
18. Fasilitasi Pembahasan Evaluasi Hasil Inventarisasi Analisa dan Pertimbangan Teknis Pemanfaatan Ruang.
19. Fasilitasi Pembahasan Evaluasi Hasil Inventarisasi Pemanfaatan Ruang.
20. Fasilitasi Pembahasan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

- a. Capaian kinerja tahun ini mengalami peningkatan daripada capaian kinerja tahun lalu.
- b. Capaian kinerja tahun ini mengalami peningkatan daripada capaian kinerja beberapa tahun terakhir.
- c. Capaian kinerja tahun ini sesuai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

1. Analisis peningkatan dan penurunan kinerja

- a. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Indikator Kinerja adalah dengan memenuhi arahan yang diberikan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 terkait dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang maupun sinkronisasi program pemanfaatan ruang dan arahan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021.
- b. Hambatan yang dialami dalam pencapaian Indikator Kinerja adalah berlakunya turunan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 memerlukan penyesuaian dari segi perangkat kelembagaan, system penyelenggaraan, dan prosedur sehingga butuh waktu untuk dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- c. Rencana tindak lanjut kedepan yang akan dijadikan sebagai langkah perbaikan dari hambatan adalah:
 1. Mengikuti sosialisasi penerapan prosedur perizinan terkait Rencana Tata Ruang (RTR).
 2. Mengembangkan sistem informasi dan operator/validator sesuai spesifikasi yang dibutuhkan.
 3. Meningkatkan koordinasi penataan ruang melalui Forum Penataan Ruang sesuai arahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022.

4. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian sasaran program Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan yang dimiliki oleh Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan yaitu *“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan daerah”* tidak lepas dari dukungan program dan kegiatan yang terlaksana pada tahun 2021 yaitu **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang** dengan kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi, dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi.

Tabel III.43. Capaian Kinerja Seksi Pertanahan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	
				Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Seksi Pertanahan					
1	Terlaksananya pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi	Jumlah Luasan Pengadaan Tanah di Tahun Berjalan	20 ha	34,6969 Ha	173,485%
		Jumlah Dokumen Pengadaan Tanah, Penyelesaian Sengketa Lahan, Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kalsel, dan Pembinaan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		Persentase Kepemilikan Lahan atas nama Pemerintah Provinsi Kalsel yang bersertifikat dalam 5 tahun	20%	28%	140%

Sumber: Hasil Perhitungan dari Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, 2022

Tabel III.44. Perbandingan Capaian Kinerja Kepala Penataan Ruang Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

No.	Indikator Kinerja	Realisasi					Target	Tahun 2021	
		2016	2017	2018	2019	2020		Realisasi	Capaian
1	Jumlah Luasan Pengadaan Tanah di Tahun Berjalan						20 ha	34,6969 Ha	173,485%
2	Jumlah Dokumen Pengadaan Tanah, Penyelesaian Sengketa Lahan, Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kalsel, dan Pembinaan Kabupaten/Kota	-	-	-			4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	Persentase Kepemilikan Lahan atas nama Pemerintah Provinsi Kalsel yang bersertifikat dalam 5 tahun						20%	28%	140%

Sumber: Hasil Perhitungan dari Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, 2022

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

- a. Realisasi untuk indikator Jumlah Luasan Pengadaan Tanah di Tahun Berjalan, yaitu 34,6969 Ha. Dengan rincian perolehan luas lahan sebagai berikut :
- ❖ Pembebasan Lahan Kolam Regulasi Kab. Hulu Sungai Tengah telah dibebaskan sebanyak 77 persil tanah (18,4348 Ha);
 - ❖ Lanjutan Pembebasan Lahan Jalan Handil Bakti - Lingkar Utara Tahap II telah dibebaskan sebanyak 12 persil tanah (0,065 Ha);
 - ❖ Pembebasan Lahan Jalan Akses Bandara Baru Syamsudin Noor Tahap II telah dibebaskan sebanyak 75 persil tanah (6,5098 Ha);
 - ❖ Pembebasan Lahan Jembatan Banjang telah dibebaskan sebanyak 2 persil tanah (0,0344 Ha);
 - ❖ Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Gudang Logistik BPBD telah dibebaskan sebanyak 6 persil tanah (4,0948 Ha);
 - ❖ Pembebasan Lahan Simpang 3 Jarak - Simpang Belangian telah dibebaskan sebanyak 18 persil tanah (0,2291 Ha);
 - ❖ Lanjutan Pembebasan Lahan Jalan Alternatif Akses ke Makam Syech M. Arsyad Al-Banjari sebanyak 1 persil tanah (0,0565 Ha);
 - ❖ Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Kawasan Olahraga Teritegrasi telah dibebaskan sebanyak 4 persil tanah (3,3986 Ha);
 - ❖ Untuk lahan Jalan Akses Bandara Baru Syamsudin Noor Tahap I yang di Konsinyasikan di Pengadilan dan dana ganti rugi lahannya telah diambil oleh pemilik lahan, yaitu ada 12 persil tanah (0,8454 Ha);
 - ❖ Untuk lahan Jalan Alternatif Akses ke Makam Syech M. Arsyad Al-Banjari yang di Konsinyasikan di Pengadilan dan dana ganti rugi lahannya telah diambil oleh pemilik lahan, yaitu ada 22 persil tanah (1,0285Ha).

Berdasarkan rincian tersebut diatas, realisasi luasan pengadaan tanah pada tahun 2022 ini sudah melebihi target.

- b. Realisasi untuk indikator Jumlah Dokumen Pengadaan Tanah, Penyelesaian Sengketa Lahan, Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kalsel, dan Pembinaan Kabupaten/Kota pada tahun anggaran 2022 ini, yaitu 4 Dokumen berupa Dokumen Perencanaan untuk Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Olahraga Terintegrasi, Dokumen Perencanaan untuk Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Gudang Logistik BPBD, Dokumen Appraisal Pengadaan Tanah Embung Jaro, dan Dokumen Perencanaan untuk

Pengadaan Tanah Makam Tokoh Masyarakat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Jumlah realisasi dokumen pada tahun 2022 ini telah memenuhi target.

- c. Realisasi untuk indikator Persentase Kepemilikan Lahan atas nama Pemerintah Provinsi Kalsel yang bersertifikat dalam 5 tahun pada tahun anggaran 2022 ini, yaitu 28%. Dalam 28% realisasi tersebut ada 6 Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah terbit (Sertifikat Hak Pakai Nomor 182, 00001, 00003, 00004, 17, 18, dan 0042).

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait (Time Series)

- a. Realisasi kinerja untuk indikator Jumlah Luasan Pengadaan Tanah di Tahun Berjalan pada tahun 2022 sebesar 34,6969 Ha lebih tinggi dari realisasi pada tahun 2021 yang hanya mencapai luasan sebesar 4,8215 Ha. Realisasi kinerja untuk indikator Jumlah Dokumen Pengadaan Tanah, Penyelesaian Sengketa Lahan, Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kalsel, dan Pembinaan Kabupaten/Kota pada tahun 2022, yaitu 4 dokumen, ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 yang realisasinya 0 dokumen. Realisasi untuk indikator Persentase Kepemilikan Lahan atas nama Pemerintah Provinsi Kalsel yang bersertifikat dalam 5 tahun pada tahun anggaran 2022 ini, yaitu 28%. Untuk indikator ini pertama kali ada di tahun 2022 jadi tidak ada perbandingan dengan tahun sebelumnya.
- b. Untuk indikator Jumlah Luasan Pengadaan Tanah di Tahun Berjalan, realisasi serta capaian kinerja pada tahun 2022 lebih tinggi dari tahun 2021 (4,8215 Ha), 2020 (5,3664 Ha), dan 2019 (12,06 Ha). Sedangkan untuk realisasi serta capaian kinerja indikator Jumlah Dokumen Pengadaan Tanah, Penyelesaian Sengketa Lahan, Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kalsel, dan Pembinaan Kabupaten/Kota pada tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 (0 dokumen) dan 2019 (2 dokumen), tetapi lebih rendah dari realisasi pada tahun 2020 (7 dokumen). Akan tetapi realisasi pada tahun 2022 ini sudah memenuhi target yang diinginkan, yaitu 4 dokumen.
- c. Realisasi kinerja tahun 2022 telah melebihi target akhir renstra, hal ini dikarenakan ada beberapa pelaksanaan pembebasan lahan yang realisasi luasannya melebihi rencana target luasan yang dicantumkan pada Rencana Kerja dan juga jumlah kebutuhan lahan serta dokumen-dokumen terkait pertanahan bertambah sepanjang tahun sesuai dengan bertambahnya rencana-rencana infrastruktur pembangunan daerah.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Upaya-Upaya yang Telah Dilakukan

Telah dilaksanakan proses persiapan dan pelaksanaan pembebasan lahan dan sengketa pembebasan lahan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, serta telah dilaksanakan pensertifikatan beberapa aset tanah yang telah dibebaskan oleh Dinas PUPR Prov. Kalsel di tahun anggaran 2022 ini.

b. Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

Beberapa hambatan dalam pelaksanaan pembebasan lahan, yaitu menunggu dokumen FS (Feasibility Study) dari bidang yang melaksanakan fisik pembangunan agar lahan yang dibebaskan sesuai dengan rencana pembangunan, serta ada beberapa ukuran lahan milik warga yang harus dikoreksi dan diukur ulang di lapangan. Untuk proses pensertifikatan lahan yang telah dibebaskan terhambat diproses pelepasan hak tanah dan pemecahan sertifikat.

c. Rencana Tindak Lanjut

Tindak lanjut untuk kendala tersebut pada proses pembebasan lahan, yaitu dilakukan koordinasi yang lebih intens dengan pihak-pihak terkait serta dibutuhkan support dari berbagai pihak terutama dari birokrasi dan pemerintah daerah yang menjadi lokasi pelaksanaan rencana pembebasan lahan, serta untuk tanah milik masyarakat yang diukur ulang dan baru mengumpulkan berkas akan dibayarkan pada tahun anggaran 2023. Tindak lanjut untuk pensertifikatan lahan milik pemerintah provinsi, yaitu dikoordinasikan dengan pihak terkait serta dianggarkan kembali dana untuk pensertifikatan lahan pada tahun anggaran 2023.

4. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian sasaran program Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan yang dimiliki oleh Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan yaitu *“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan daerah”* tidak lepas dari dukungan program dan kegiatan yang terlaksana pada tahun 2022 yaitu **Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, dan, Program Penatagunaan Tanah** dengan kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi, dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi.

8. Bidang Kesekretariatan

Capaian Kinerja Sekretariatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.45. Capaian Kinerja Sekretaris

No.	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
SP .6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	85,71%	89,31%	104,81%
	Meningkatnya Pelayanan sarana dan prasarana dan administrasi perkantoran	Tingkat kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	100%	98%	98%
	Meningkatnya Pelayanan administrasi keuangan	Persentase aset yang tercatat	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian					100,94%

Sumber: Hasil Perhitungan dari Bidang Kesekretariatan, 2021

Rumus Perhitungan:

a. Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Total nilai seluruh komponen akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dievaluasi oleh Inspektorat

b. Tingkat kepuasan terhadap layanan kesekretariatan

$$x = \frac{\text{Jumlah kebutuhan yang harus dipenuhi}}{\text{Jumlah kebutuhan yang telah dipenuhi}} \times 100\%$$

c. Persentase aset yang tercatat

$$x = \frac{\text{aset yang tercatat}}{\text{seluruh aset yang dimiliki oleh SOPD}} \times 100\%$$

Tabel III.46. Perbandingan Capaian Kinerja Sekretaris

No.	Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2021		
		2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	77,62	77,92	82,76	84,21	84,71	85,71%	89,31%	104,81%
2	Tingkat kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	-	-	-	-	-	100%	98%	98%
3	Persentase aset yang tercatat	100	100	100	100	100	100%	100%	100%

Sumber: Hasil Perhitungan dari Kesekretariatan, 2021

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada tahun 2021, realisasi indikator Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih menggunakan realisasi tahun 2020 sebesar 84,71% dengan capaian sebesar 99,41%.

Tingkat kepuasan terhadap layanan kesekretariatan

Realisasi yang diperoleh indikator tingkat kepuasan terhadap layanan kesekretariatan pada tahun 2021 95% dari target 95% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Persentase Aset yang Tercatat

Realisasi yang dicapai indikator Persentase Aset yang tercatat sebesar 100% dari target 100% atau besar capaian kinerja 100%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait (Time Series)

Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada tahun 2021, realisasi indikator Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih menggunakan realisasi tahun 2020 sebesar 84,71% dengan capaian sebesar 99,41%.

Tingkat kepuasan terhadap layanan kesekretariatan

Realisasi yang diperoleh indikator tingkat kepuasan terhadap layanan kesekretariatan pada tahun 2021 95% dari target 95% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Persentase Aset yang Tercatat

Realisasi yang dicapai indikator Persentase Aset yang tercatat sebesar 100% dari target 100% atau besar capaian kinerja 100%.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada tahun 2021, realisasi indikator Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selalu meningkat dikarenakan komitmen Dinas PUPR yang selalu meningkatkan akuntabilitas instansi.

Tingkat kepuasan terhadap layanan kesekretariatan

Capaian kinerja yang diperoleh indikator tingkat kepuasan terhadap layanan kesekretariatan pada tahun 2022 100% karena sekretariat mampu menyediakan pelayanan sesuai dengan yang diharapkan.

Persentase Aset yang Tercatat

Realisasi yang dicapai indikator Persentase Aset yang tercatat sebesar 100% dari target 100% atau besar capaian kinerja 100%.

4. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian sasaran program Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan yang dimiliki oleh Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan yaitu “*Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan daerah*” tidak lepas dari dukungan program dan kegiatan yang terlaksana pada tahun 2020 yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**.

Pencapaian kinerja Sekretaris tidak luput didukung oleh para kepala seksi yang ada di bidang kesekretariatan yang dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel III.47. Capaian Kinerja Bidang Sekretariat

No.	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan					
1	Tersedianya Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen perencanaan yang telah ditentukan	3	3	100%
		Jumlah dokumen pelaporan yang telah ditentukan	3	3	100%

Sumber: Hasil Perhitungan dari Bidang Kesekretariatan, 2021

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Jumlah dokumen perencanaan yang telah ditentukan

Pada tahun 2021, realisasi jumlah dokumen perencanaan yang telah ditentukan adalah 3 dokumen dari target 3 dokumen atau besar capaian kinerja 100%.

Jumlah dokumen pelaporan yang telah ditentukan

Realisasi yang diperoleh indikator jumlah dokumen pelaporan yang telah ditentukan adalah 3 dokumen dari target 3 dokumen atau besar capaian kinerja 100%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait (Time Series)

Jumlah dokumen perencanaan yang telah ditentukan

Capaian kinerja jumlah dokumen perencanaan selalu stabil pada 100% dari tahun ke tahun.

Jumlah dokumen pelaporan yang telah ditentukan

Capaian kinerja jumlah dokumen pelaporan selalu stabil pada 100% dari tahun ke tahun.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Capaian kinerja Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan selalu stabil dengan rincian dokumen RKA, Perjanjian Kinerja, Renja, LAKIP, LPPD, dan RFK.

4. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian sasaran program Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan yang dimiliki oleh Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan yaitu “*Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan daerah*” tidak lepas dari dukungan program dan kegiatan yang terlaksana pada tahun 2020 yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi** dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Tabel III.48. Capaian Kinerja Bidang Sekretariat

No.	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Sub Bagian Keuangan dan Aset					
1	Tersusunnya perencanaan dan administrasi keuangan dan aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala	6	6	100%

Sumber: Hasil Perhitungan dari Bidang Kesekretariatan, 2021

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala

Pada tahun 2021, realisasi jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala yang telah ditentukan adalah 6 dokumen dari target 6 dokumen atau besar capaian kinerja 100%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait (Time Series)

Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala

Capaian kinerja jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala selalu stabil pada 100% dari tahun ke tahun.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Capaian kinerja Sub Bagian Keuangan dan Aset selalu stabil dengan rincian dokumen LRA, Neraca, Laporan Operasional, Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

4. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian sasaran program Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan yang dimiliki oleh Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan yaitu "*Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan daerah*" tidak lepas dari dukungan program dan kegiatan yang terlaksana pada tahun 2020 yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi** dengan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2022

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 mendapatkan alokasi anggaran APBD-P Dinas PUPR Prov Kalsel adalah sebesar Rp 973.701.669.371,00. Penyerapan anggaran dinas masih menunjukkan hasil yang baik yaitu sebesar 79,16% dari pagu dana atau sejumlah Rp 770.807.865.244,00.

2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program

Tabel III.. Perincian Anggaran Berdasarkan Sasaran

No	Sasaran Strategis	Program Prioritas			
		Uraian	Anggaran	Realisasi	Presentase
			Rp	Rp	%
1	Meningkatnya ketersediaan air untuk mendukung kedaulatan pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	93.517.624.237,00	56.334.262.736,00	60,24
2	Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing	Program Penyelenggaraan Jalan	526.969.247.021,00	511.985.915.817,00	97,16
3	Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	27.938.118.365,00	20.474.033.089,00	73,28
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.527.747.400,00	2.312.958.032,00	91,50
		Program Penataan Bangunan Gedung	39.053.914.883,00	37.747.372.863,00	96,65
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	39.232.937.819,00	32.626.547.163,00	83,16
4	Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor di tingkat Provinsi Kalsel	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	2.126.990.300,00	1.844.568.267,00	86,72

5	Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi Provinsi Kalsel	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	14.755.376.900,00	12.159.418.271,00	82,41
		Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	1.063.649.200,00	738.727.400,00	69,45
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1.299.736.800,00	500.974.852,00	38,54
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	192.811.559.227,00	64.429.674.218,00	33,42
		Program Penatagunaan Tanah	771.850.300,00	297.940.500,00	38,60
6	Meningkatnya kualitas tata kelola Dinas PUPR Provinsi Kalsel	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	31.632.916.919,00	29.355.472.036,00	92,80

Sumber: Laporan RFK 2022

2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perencanaan Penganggaran perlu berfokus pada kegiatan prioritas yg berdampak pada dukungan dana dari pemerintah pusat seperti dana DAK ataupun dana lainnya. Sehingga dinas PUPR dapat melakukan efisiensi dalam pembangunan infrastruktur di kalsel

Refocusing kegiatan diarahkan kepada hal tersebut melalui kolaborasi pendanaan bersama antar pemerintah baik pusat maupun daerah untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan di lingkup pemprov Kalsel.

Untuk perencanaan penganggaran di masa datang Dinas PUPR perlu tetap memperhatikan dan berfokus pada pembangunan infrastruktur tematik sesuai arahan Kemenpu agar pendanaan dapat dilakukan secara kolaborasi sehingga penggunaan sumber daya tetap dapat dilakukan secara efisien.

Tabel III.. Perincian Perbandingan Program dan Kegiatan TA.2021 dan TA.2022

No	2021		No	2022	
	Nama Program	Nama Kegiatan		Nama Program	Nama Kegiatan
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	2	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
5	Program Penataan Bangunan Gedung	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	5	Program Penataan Bangunan Gedung	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
6	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi
		Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi			Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
9	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	9	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi
		-			-
		-			-
10	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
11	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	11	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
12	Program Penatagunaan Tanah	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	12	Program Penatagunaan Tanah	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
13	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
TOTAL		TOTAL	
13 Program	25 Kegiatan	13 Program	25 Kegiatan
TOTAL ANGGARAN		TOTAL ANGGARAN	
754,916,788,017.00		973.701.669.371,00	

Sumber: Laporan RFK TA. 2021 dan TA.2022

Tabel III.. Perincian Perbandingan Belanja Anggaran TA.2020 dan TA.2021

No.	2021		2022	
	Belanja Langsung	Jumlah	Belanja Langsung	Jumlah
1.	Belanja pegawai	19.758.005.015,00	Belanja pegawai	23.070.588.140,00
2.	Belanja barang dan jasa	665.697.203.019,00	Belanja barang dan jasa	950.631.081.231,00
	Total	685.455.208.034,00	Total	973.701.669.371,00

Sumber: Laporan RFK TA. 2021 dan TA.2022

Dari dua tabel diatas, dapat terlihat perbedaan yang signifikan pada jumlah anggaran TA.2021 dan TA. 2022, hal ini dikarenakan terjadinya Covid-19 sehingga dilakukan pengurangan anggaran pada tahun 2021, sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan pesat.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Pencapaian sasaran yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) sasaran strategis dan 8 indikator kinerja utama yaitu 103,09% dengan kategori Sangat Memuaskan, dengan rincian 8 (delapan) indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori Sangat Memuaskan.

Terlepas dari pencapaian kinerja yang terus membaik, pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan masih akan terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur menjadi isu strategis yang utama bersama penguatan konektivitas, penguatan ketahanan pangan, penyediaan air minum serta terpadunya pengembangan kawasan dengan pembangunan infrastruktur dengan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pelelangan barang dan jasa sejak dini agar waktu pekerjaan bisa lebih cepat dan meminimalkan resiko keterlambatan pekerjaan yang mempengaruhi kinerja serta manfaat pekerjaan bisa dirasakan lebih awal.
2. Menyelenggarakan asistensi dan pelatihan bagi pejabat struktural tentang sistem akuntabilitas kinerja.
3. Menampilkan capaian kinerja di Web resmi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.



LAMPIRAN